



**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH, SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN
DAMPAKNYA PADA AKUNTABILITAS KINERJA
LEMBAGA
(Survei Pada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Teknisi
Akuntansi Bond'09)**

TESIS

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan
Program Magister Akuntansi**

**UNIVERSITAS
MERCU BUANA**

OLEH

LAUHUL MACHFUZH

55517120010

**PASCA SARJANA MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERSITAS MERCUBUANA
JAKARTA
2020**

PENGESAHAN TESIS

Judul : Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Dampaknya Pada Akuntabilitas Kinerja Lembaga (Survei Pada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Teknisi Akuntansi Bond'09)

Bentuk Tesis : Akuntansi Keuangan

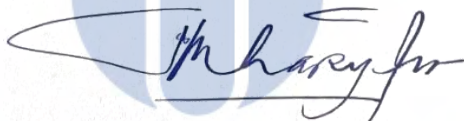
Nama : Lauhul Machfuzh

NIM : 55517120010

Program : Magister Akuntansi

Tanggal :

Mengesahkan
Pembimbing



(Dr. Hari Setiyawati, Ak., M. Si., CA)

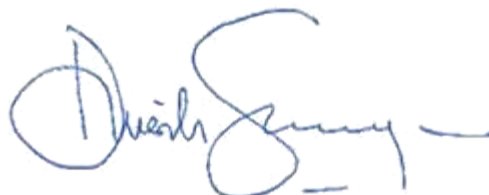
UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Direktur Pascasarjana
Akuntansi

Ketua Program Studi Magister



(.....)



(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa semua pernyataan dalam tesis ini:

Judul : Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Dampaknya Pada Akuntabilitas Kinerja Lembaga (Survei Pada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Teknisi Akuntansi Bond'09

Bentuk Tesis : Akuntansi Keuangan

Nama : Lauhul Machfuzh

NIM : 55517120010

Program : Magister Akuntansi

Tanggal :

Merupakan hasil studi pustaka, penelitian lapangan dan karya saya sendiri dengan bimbingan Komisi Dosen Pembimbing yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana.

Karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada program sejenis ini perguruan tinggi lain. Semua informasi, data, dan hasil pengolahannya yang digunakan, telah dinyatakan secara jelas sumbernya dan dapat diperiksa kebenarannya.

Jakarta, Februari 2021

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

(Lauhul Machfuzh)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **”Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Dampaknya Pada Akuntabilitas Kinerja Lembaga (Survei Pada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Teknisi Akuntansi Bond’09”**.

Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata dua (S2) pada program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa bersyukur atas selesainya karya ini, karena proses penulisan ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak yang telah mendoakan dan memberikan bantuan serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, oleh karena itu penulis secara khusus ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada Ibu Dr. Hari Setiyawati SE, Ak, M.si,C.A, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan tesis.

Penulis juga berterimakasih kepada penguji ujian seminar proposal, seminar hasil, penguji sidang tesis, Direktur Pasca Sarjana, beserta segenap jajarannya yang telah berupaya meningkatkan situasi kondusif di fakultas. Kemudian penulis juga berterimakasih kepada Ibu Dr. Hari Setiyawati SE, Ak, M.si,C.A, selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Akuntansi dan kepada seluruh Dosen dan staf administrasi Prodi Magister Akuntansi.

Terakhir penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Suwahyu Hasan Bakri dan Ibu Alm. Siti Sofiah, serta Kakak dan Adik tercinta, Ahmad Wirawan Aziz dan Jiadaturrahman atas dukungan moril dan materil serta doa yang tak pernah putus. Kepada Sinta, terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang telah diberikan. Kepada sahabat-sahabat, Wendi Nurhayat, Ririn Setyaningsih, Dyah Ayu, Dian, Riri Pratiwi terima kasih untuk diskusi-diskusi, kekuatan, doa, dan kebersamaan yang menyenangkan.

Kepada seluruh teman Magister Akuntansi angkatan tahun 32 dan segenap manajemen PT. Secret Recipe Indonesia dan LSK Teknisi Akuntansi Bond '09 yang telah memberikan dukungan tiada henti kepada penulis dan kepada seluruh pihak yang telah mendukung, mendoakan dan membantu dalam proses penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu.



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Tangerang, Februari 2021

Penulis,

Lauhul Machfuzh

Abstrak

Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan masih saja terus terulang. Salah satunya yaitu lembaga sertifikasi kompetensi teknisi akuntansi bond'09 dikarenakan Banyak nya ditemukan akuntan yang belum memahami Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta Rendahnya kualitas laporan dapat disebabkan oleh belum diterapkannya sistem informasi akuntansi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dan dampaknya pada akuntabilitas kinerja lembaga. Populasi pada penelitian ini adalah pada lembaga sertifikasi kompetensi teknisi akuntansi bond'09. Teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 39 lembaga. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan software smartPLS 3.0. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas publik.

Kata Kunci : Pemahaman standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia, kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja lembaga



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Abstract

One of them is the accounting technician competency certification agency bond'09 because many accountants are found who do not understand the Government Accounting Standards (SAP) and the low quality of reports can be caused by the absence of a financial accounting information system. This study aims to examine the effect of understanding government accounting standards, accounting information systems and human resource competencies on the quality of financial reports and their impact on the accountability of institutional performance. The population in this study was the accounting technician competency certification agency bond'09. The sampling technique was purposive sampling and obtained a sample of 39 institutions. Methods of data analysis in this study using smartPLS 3.0 software. The results of the study conclude that government accounting standards have no significant effect on the quality of financial reports, accounting information systems have no significant effect on the quality of financial reports, human resource competence has a significant positive effect on the quality of financial reports, and the quality of financial reports has a significant positive effect on public accountability.

Keyword : *Understanding government accounting standards, accounting information systems and human resource competence, quality of financial reports and performance acibility of institution.*



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kontribusi Penelitian.....	7
a. Kontribusi Teori.....	7
b. Kontribusi Praktik.....	8
c. Kontribusi Kebijakan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Pustaka.....	9
1. Pemahaman Standar Akuntansi Akuntansi.....	9
2. Sistem Informasi Akuntansi.....	15
2.1 Pengertian Sistem.....	15
2.2 Pengertian Informasi.....	16
2.3 Pengertian Akuntansi.....	18
2.4 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi.....	19
2.5 Tujuan, Fungsi dan Unsur - Unsur Sistem Informasi Akuntansi	22
2.6 Manfaat Sistem Informasi Akuntansi.....	26
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	27
4. Kualitas Laporan Keuangan.....	29
4.1 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.....	31

5. Pengertian Akuntabilitas Kinerja Lembaga	34
6. Kajian Riset Terdahulu	39
B. Rerangka Pemikiran	46
C. Hipotesis	51
BAB III DESAIN DAN METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	52
B. Definisi Operasionalisasi Variabel dan Pengukuran Variabel	52
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	57
D. Teknik Pengumpulan Data	62
E. Metode Analisis	63
1. Analisis Partial Least Square	65
a. Model Pengukuran atau Outer Model	65
b. Model Struktural dan Inner Model.....	66
2. Pengujian Hipotesis	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	69
A. Deskripsi Objek Penelitian	69
B. Analisis Deskriptif Variabel	71
1. Deskripsi Variabel Standar Akuntansi Pemerintah	71
2. Deskripsi Variabel Sistem Informasi Akuntansi	73
3. Deskripsi Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia	75
4. Deskripsi Variabel Kualitas Laporan Keuangan	76
5. Deskripsi Variabel Akuntabilitas Publik.....	77
6. Uji Kualitas Data	79
6.1 Uji Validitas	85
6.2 Uji Reliabilitas	86
6.3 Evaluasi <i>Goodness Of Fit</i> Model Struktural	88
C. Pengujian Hipotesis	89
D. Pembahasan	95

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	54
Tabel 3.2 Pemilihan Sampel	58
Tabel 3.3 Daftar Sampel Lembaga Sertifikasi Kompetensi Teknisi Akuntansi	59
Tabel 3.4 Skor Nilai Skala Likert	63
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Sampel	69
Tabel 4.2 Deskripsi Variabel Standar Akuntansi Pemerintah	70
Tabel 4.3 Deskripsi Variabel Sistem Informasi Akuntansi	72
Tabel 4.4 Deskripsi Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia	74
Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Kualitas Laporan Keuangan	75
Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Akuntabilitas Publik	76
Tabel 4.7 Uji Validitas	77
Tabel 4.8 Uji Validitas	85
Tabel 4.9 Uji Reliabilitas	87
Tabel 4.10 R Square	88
Tabel 4.11 Path Coefficients	91
Tabel 4.12 Path Coefficients	92
Tabel 4.13 Path Coefficients	93
Tabel 4.14 Path Coefficients	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran	50
Gambar 3.1 Konstruksi Diagram Jalur	67
Gambar 4.1 Output Loading Penelitian	80
Gambar 4.2 Output Loading Penelitian Setelah <i>Drop</i>	84
Gambar 4.3 Diagram Jalur Pengujian Hipotesis	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi kinerja keuangan perusahaan, guna memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai oleh pemerintah tersebut selama tahun anggaran yang bersangkutan. Selain pemerintah pusat yang membuat laporan keuangan, pemerintah, kota, atau provinsi beserta seluruh badan dinas dan instansi pun harus mampu membuat laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk memberikan gambaran informasi tentang posisi harta, utang, dan modal yang terjadi dalam pemerintah tersebut. Pemerintah berkewajiban mempublikasikan informasi berdasarkan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian informasi yang dipublikasikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pemakai (Fuad, 2013: 5).

Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemahaman akan standar akuntansi pemerintah sangat penting dalam pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum juga mempunyai kemampuan prediktif dan prospektif dalam hal memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan. Standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Pemerintah diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri. Selain adanya standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang sebagai pedoman dalam proses penyusunan laporan keuangan, proses penyusunan laporan keuangan juga harus dilakukan secara efektif dan efisien, tepat waktu serta data-data yang dihasilkan dari laporan keuangan tersebut harus akurat.

Menurut Isthika, dkk (2014), laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam standar akuntansi pemerintah dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Rendahnya kualitas laporan dapat disebabkan oleh belum diterapkannya sistem informasi akuntansi keuangan atau kurangnya pemahaman akuntansi dari penyusun laporan keuangan itu sendiri atau kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki dan atau peran internal audit yang masih lemah (Isthika, dkk 2014).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2018) menilai, kualitas pelaporan keuangan pemerintah Indonesia masih rendah. Padahal situasi ini dapat menjadi peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Menurut Nunuy, IAI sebenarnya sudah menentukan standar kualitas pelaporan keuangan atau akuntansi pemerintah ke dalam lima level. Namun, belum ada pemerintah daerah yang menyentuh level lima atau terbaik. Hingga saat ini, hampir sebagian besar

pemerintahan Indonesia di kabupaten/kota baru bisa mencapai level tiga dan dua. unuy menilai, kualitas laporan keuangan sangat penting untuk memitigasi terjadinya korupsi. Hal ini karena laporan keuangan merupakan bentuk dari transparansi pemerintah terhadap masyarakat. Dengan demikian, kualitas pelaporan keuangan bisa berjalan dengan baik.

Di sisi lain, dia juga meminta kepada para akuntan untuk aktif melakukan riset. Tujuannya, agar mereka mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pelaporan yang berkualitas. Kemudian hasil riset tersebut dapat diterapkan menjadi dasar regulasi nantinya.

Jadi, fenomena mengenai kualitas laporan keuangan sangat menarik untuk dikaji lebih jauh. Kenyataan di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai dan tidak mengikuti prinsip akuntansi berlaku umum. Banyak laporan keuangan yang dalam penyusunannya belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan belum memenuhi kelengkapan yang telah ditentukan serta kurangnya bukti-bukti transaksi yang dapat ditemukannya.

Rendahnya kualitas laporan dapat disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan itu sendiri atau belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan dan atau peran internal audit masih lemah (Sari, dkk, 2014).

Fenomena diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wati, dkk (2014) yang mengatakan bahwa pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan berdasarkan sistem akuntansi keuangan, sehingga kualitas yang dihasilkan

dari laporan keuangan tersebut dapat meningkat. Namun kenyataannya tidak semua pegawai di pemerintahan memahami sistem akuntansi keuangan tersebut.

Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan.

Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2006:146).

Penelitian Diani (2013) tentang” Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat di Kota Parlaman)”. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman akuntansi dan peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah sedangkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian Sari, dkk (2014) tentang pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan pemanfaatan sistem informasi keuangan

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah menyimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan urian diatas, masalah yang timbul dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat (SKPD) Kabupaten Pati antara lain yaitu, karena Sistem Informasi Akuntansi Keuangan (SIKAD) belum sepenuhnya dapat meningkatkan efektifitas, menjawab kebutuhan informasi, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan efisiensi aparatur pemerintah dalam mengerjakan pekerjaannya.

Namun secara persepsi, Satuan Kerja Perangkat (SKPD) Kabupaten Pati telah melaksanakannya dengan sebaik mungkin, namun dalam kenyataannya yang ada pada SKPD belum bisa membuktikan bahwa mereka mampu untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik.

Jadi hal ini menunjukkan bahwa SKPD belum sepenuhnya memanfaatkan sistem informasi akuntansi keuangan. Padahal sistem informasi akuntansi keuangan (SIKD) adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen pemerintah.

Dengan berbagai informasi pengguna laporan keuangan, pemerintah wajib menyajikan informasi keuangan negara secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat digunakan sebagai dasar

dalam membuat perencanaan, melakukan pengendalian dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian diatas mengingat pentingnya kualitas laporan keuangan pemerintah bagi lembaga sertifikasi kompetensi tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mengambil judul ***“Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Dampaknya Pada Akuntabilitas Kinerja Lembaga (Survei Pada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Teknisi Akuntansi Bond’09)”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja lembaga?

C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk melihat hasil dari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaruh signifikan pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan.
- b. Untuk menganalisis pengaruh signifikan sistem informasi akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan.
- c. Untuk menganalisis pengaruh signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
- d. Untuk menganalisis pengaruh signifikan kualitas laporan keuangan terhadap dampaknya akuntabilitas kinerja lembaga.

2. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta memberikan kegunaan sebagai berikut:

a. Kontribusi Teori

Bagi pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi, terutama berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, khususnya dalam pembuatan laporan keuangan ini diharapkan dapat menambah literatur akuntansi mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan dampaknya pada akuntabilitas kinerja lembaga.

b. Kontribusi Praktik

1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Informasi laporan keuangan bisa bermanfaat untuk mengambil keputusan siapa yang akan diberikan dana beasiswa dan kemudian bermanfaat untuk mengelola sumber dana yang diberikan oleh pemerintah.

2) Lembaga Sertifikasi Teknisi Akuntansi Bond'09

Lembaga sertifikasi teknisi akuntansi bond'09 mempunyai kepentingan terhadap informasi laporan keuangan bagi kelangsungan satuan lembaga karena lembaga sertifikasi teknisi akuntansi bond'09 akan melihat kemampuan seorang akuntan lembaga tersebut dalam mengelola laporan keuangan suatu perusahaan yang dinilai baik.

c. Kontribusi Kebijakan

Bagi pihak manajemen lembaga sertifikasi teknisi akuntansi bond'09 penelitian ini diharapkan mampu menjadi wacana serta referensi bagi manajemen lembaga sertifikasi teknisi akuntansi bond'09 untuk menentukan kebijakan- kebijakan yang diambil serta sebagai dasar penentuan pengambilan keputusan bagi manajemen.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian pustaka ini dijelaskan mengenai teori yang mendasari atau mendukung perumusan hipotesis dalam penelitian ini, selain itu juga deskripsi dari variabel-variabel yang terdapat di dalam penelitian ini. Dan berikut masing-masing penjelasannya ada dibawah ini.

1. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan pemerintah ini meliputi SAP berbasis kas menuju akrual dan SAP berbasis akrual. Menurut Permendagri No 64 Tahun 2013 menyatakan standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Penerapan SAP berbasis akrual ditetapkan tanggal 22 Oktober 2010 sedangkan SAP berbasis kas menuju akrual berlaku selama masa transisi bagi

entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksiapan ini terjadi dikarenakan:

- a. Kemampuan SDM yang terbatas yang dimiliki oleh pemerintah,
- b. Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 yang belum intensif,
- c. Belum diterbitkannya peraturan tentang penerapan akuntansi berbasis akrual, dan
- d. Belum memiliki sistem pengelolaan keuangan yang mendukung terlaksananya penerapan akuntansi berbasis akrual (IHPS I, 2014).

Menurut Bastian (2010:137), Standar akuntansi pemerintahan, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Tentang Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, terdapat kerangka konseptual dan (13) tiga belas PSAP yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah

Kerangka konseptual akuntansi pemerintah adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP dan merupakan acuan bagi komite standar akuntansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemeriksaan dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur PSAP.

b. PSAP Nomer 01 Penyajian Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan akrual basis sepenuhnya tetap menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis kas. Komponen pokok laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

c. PSAP Nomer 02 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu (1) periode.

d. PSAP Nomer 03 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

e. PSAP Nomer 04 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.

f. PSAP Nomer 05 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

g. PSAP Nomer 06 Akuntansi Investasi

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

h. PSAP Nomer 07 Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

i. PSAP Nomer 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh biaya perolehan tersebut.

j. PSAP Nomer 09 Akuntansi Kewajiban

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

k. PSAP Nomer 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam dua jenis yaitu: kesalahan yang tidak berulang dan kesalahan yang berulang dan sistemik. Kesalahan yang tidak berulang adalah dikelompokkan dalam dua harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

l. PSAP Nomer 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

m. PSAP Nomer 12 Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan sebagai berikut.

1. Pendapatan-LO
2. Beban
3. Surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya
4. Kegiatan non operasional
5. Surplus/defisit operasional sebelum pos luar biasa
6. Pos luar biasa
7. Surplus/defisit laporan operasional

Periode pelaporan laporan operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi tersebut.

n. PSAP Nomer 13 Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Laporan keuangan BLU adalah bentuk pertanggung jawaban BLU yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan

Catatan atas Laporan Keuangan, sehingga BLU kini melaporkan 7 laporan keuangan yang disajikan dengan dasar akrual basis.

Dari penjelasan teori diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah adalah suatu prinsip-prinsip akuntansi yang disusun mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi yang telah di terapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

2. Sistem Informasi Akuntansi

2.1. Pengertian Sistem

Pada hakekatnya, akuntansi merupakan sistem informasi yang memberikan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Dalam hal ini informasi merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi suatu perusahaan, terutama informasi keuangan sangat dibutuhkan oleh berbagai macam pihak yang berkepentingan di luar maupun di dalam perusahaan seperti pemilik, manajer, karyawan, pelanggan, kreditur dan pemerintah yang dimaksud pihak di luar perusahaan (eksternal) yaitu pelanggan kreditur dan pemerintah sedangkan yang di dalam perusahaan (internal) yaitu pemilik, manajer dan karyawan. Pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) menggunakan laporan akuntansi sebagai sumber informasi utama untuk pengambilan keputusan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar maupun dalam perusahaan, disusunlah suatu sistem akuntansi. Sistem ini direncanakan untuk

menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak luar dan dalam perusahaan, sistem akuntansi ini disusun secara manual atau diproses dengan komputerisasi. Sistem dan prosedur merupakan hal mutlak dan sangat diperlukan demi kelangsungan perusahaan. (Romney & Steinbart, 2015) , “Sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan”. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Menurut Mulyadi (2016: 1), Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

2.2. Pengertian Informasi

Di bawah ini adalah pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya yaitu:

1. Menurut Romney dan Steinbart (2015:4), “Data adalah fakta yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses oleh sistem informasi”.
2. Menurut Romney dan Steinbart (2015:4), “Informasi adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan”. Sebagaimana perannya, pengguna membuat keputusan yang lebih baik sebagai kuantitas dan kualitas dari peningkatan informasi. Menurut Romney dan Steinbart (2015:4), “Nilai informasi adalah keuntungan yang dihasilkan oleh informasi dikurangi dengan biaya untuk memproduksinya”.

Informasi sangat penting dalam suatu organisasi. Informasi mengarahkan dan memperlancar kegiatan sehari-hari. Suatu sistem yang kurang mendapat informasi akan menjadi tidak maksimal dan kurang berguna karena masukan-masukan dari data kurang berfungsi dengan baik. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata (fakta) yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

Informasi dalam sebuah perusahaan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangan perusahaan. Akibat kurang mendapatkan informasi dalam waktu tertentu perusahaan tersebut akan mengalami ketidakmampuan mengontrol sumber daya yang pada akhirnya perusahaan tersebut akan mengalami kekalahan dalam bersaing. Informasi berasal dari data yang telah diproses menjadi suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.

Informasi bukan sekedar fakta yang diproses dalam suatu laporan formal, sebab informasi dari seseorang juga dapat merupakan data bagi orang lain. Informasi juga dapat digunakan oleh pemakainya untuk mengambil tindakan penyelesaian konflik, mengurangi ketidakpastian, dan pengambilan keputusan. Suatu informasi dapat digunakan untuk pengambilan keputusan jika kualitas dari suatu

informasi itu baik. Kualitas suatu informasi tergantung dari tiga hal, yaitu informasi harus akurat, tepat waktu, dan relevan. Akurat berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan, serta harus jelas mencerminkan maksud dari informasi tersebut. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Tepat waktu artinya informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat karena informasi yang usang tidak akan mempunyai nilai lagi.

2.3. Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu alat yang dipakai sebagai bahasa bisnis. Akuntansi dapat membantu dalam menghasilkan informasi yang berguna baik bagi pihak-pihak yang menyelenggarakannya maupun pihak-pihak luar terutama yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban. Pengertian menurut para ahli pun berbeda-beda. Pengertian akuntansi menurut Harahap (2015:2) “Akuntansi merupakan bahasa bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu”. Menurut *Accounting Principle Board Statement No. 4* yang dikutip dari buku Harahap (2015:2) “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih

keputusan terbaik di antara beberapa alternatif keputusan. Menurut Romney dan Steinbart (2015:11), “Akuntansi adalah proses identifikasi, pengumpulan dan penyimpanan data serta proses pengembangan, pengukuran dan komunikasi informasi”. Berdasarkan definisi tersebut, akuntansi “merupakan sistem informasi karena SIA mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses akuntansi dan data lain untuk menghasilkan informasi bagi pembuat keputusan”.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses identifikasi, penyajian, pencatatan dan mengkomunikasikan segala kejadian ekonomi yang terjadi dalam suatu entitas yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lain kepada pemakai informasi yang berkepentingan baik itu pihak internal maupun eksternal untuk memudahkan pengelolaan perusahaan.

2.4. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Romney dan Steinbart (2015:10), “Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan bagi pengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur, dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan. Ada enam komponen dari sistem informasi akuntansi (SIA), yaitu:

1. Orang yang menggunakan sistem.
2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data.

3. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya.
4. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data.
5. Infrastruktur teknologi informasi, meliputi komputer, perangkat peripheral, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA.
6. Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data SIA.

Enam komponen tersebut memungkinkan SIA untuk memenuhi tiga fungsi bisnis penting sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personel organisasi. Organisasi memiliki sejumlah proses bisnis, seperti melakukan penjualan atau membeli bahan baku yang sering diulang.
2. Mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas, sumber daya, dan personel. Pembuatan keputusan akan dibahas secara detail dalam bab selanjutnya.
3. Memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi.

Menurut Susanto (2017:72) Sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai: “kumpulan (integrasi) dari sub-sub sistem/ komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi

yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan”. Sistem informasi menerima *output* disebut sebagai transaksi, yang kemudian dikonversi melalui berbagai proses menjadi *output* informasi yang akan didistribusikan kepada para pemakai informasi. Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa antara sistem dan prosedur merupakan satu kesatuan. Dalam suatu sistem biasanya terdiri dari beberapa prosedur, yang mana dapat mempengaruhi prosedur yang lain.

Akuntansi dan sistem informasi sangat berkaitan erat dimana kaitan yang erat ini tercermin dalam penggunaan istilah informasi akuntansi yang menyangkut semua kegiatan dan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan.

Menurut Krismiaji (2015:4), “Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis”. Menurut Samiaji (2009:7) “Sistem akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat dan menyimpan, dan memproses data sehingga menghasilkan informasi yang berguna dalam membuat keputusan. Sistem akuntansi ini bisa secara manual maupun terkomputerisasi atau kondisi diantara keduanya (gabungan manual dan komputerisasi)”. Menurut Diptyana dan Dewi (2014:6) sistem informasi akuntansi adalah “Suatu kesatuan aktivitas, data, dokumen dan teknologi yang keterkaitannya dirancang untuk mengumpulkan dan memproses data,

sampai dengan menyajikan informasi kepada para pengambil keputusan di internal organisasi dan eksternal organisasi”

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sistem berbasis komputer dan serangkaian kegiatan untuk menangani transaksi perusahaan agar seragam, dilengkapi dengan berbagai formulir, catatan, prosedur, dan laporan guna menghasilkan informasi yang berguna untuk perencanaan dan pengawasan.

2.5. Tujuan, Fungsi, dan Unsur – Unsur Sistem Informasi Akuntansi

Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Pada umumnya, sejalan dengan pertumbuhan perusahaan bertambah pula jumlah pemakai informasi karena semakin banyaknya pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha, yaitu dalam transaksi internal dan eksternal serta pelaksanaan operasi kerja dan pengambilan keputusan. Menurut Susanto (2013:8), sistem informasi akuntansi dibangun dengan tujuan utama yaitu untuk mengolah data akuntansi yang berasal dari berbagai sumber menjadi informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai macam pemakai untuk mengurangi resiko saat mengambil keputusan. Tujuan dari penyusunan sistem informasi akuntansi yang dilakukan perusahaan diharapkan agar dapat:

1. Mengembangkan dan memperbaiki informasi baik berupa kualitas seperti kelengkapan, ketelitian, kebenaran dan ketepatan waktu penyajian, sehingga informasi tersebut dapat menjadi informasi yang

berguna dalam pengambilan keputusan bagi semua tindakan manajemen pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemilik perusahaan dan pemegang saham.

2. Mengamankan harta kekayaan perusahaan dengan menyempurnakan pengendalian (kontrol) organisasi, menekankan pada pengendalian internal (*internal control*) yang lebih memadai dan menyempurnakan prosedur-prosedur sehingga akan memperkecil peluang terjadinya kecurangan-kecurangan.
3. Mengurangi pembiayaan penyelenggaraan administrasi ke tingkat yang lebih rendah daripada nilai manfaatnya, dengan cara:
 - a. Mempersingkat tahapan prosedur dan catatan yang dianggap kurang penting.
 - b. Menyederhanakan proses pengolahan dan penyajian informasi agar lebih mudah dipahami untuk menghindari kesalahpahaman. Kebutuhan informasi yang semakin besar memerlukan perhatian yang cukup besar dalam penggunaannya. Hal ini disebabkan untuk para pemakai informasi baik pihak internal maupun eksternal selalu dihadapkan pada situasi ketidakpastian yaitu keadaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dan kondisi yang selalu berubah.

Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Susanto (2013:8), yang sangat erat hubungannya satu sama lain yaitu:

1. “Mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari

Suatu perusahaan agar dapat tetap eksis perusahaan tersebut harus terus beroperasi dengan melakukan sejumlah aktivitas bisnis yang peristiwanya disebut sebagai transaksi seperti melakukan pembelian, penyimpanan, proses produksi dan penjualan.

2. Mendukung proses pengambilan keputusan

Tujuan yang sama pentingnya dari SIA adalah untuk memberi informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan harus dibuat dalam kaitannya dengan perencanaan dan pengendalian aktivitas perusahaan.

3. Membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal.

Setiap perusahaan harus memenuhi tanggung jawab hukum. Salah satu tanggung jawab penting adalah keharusannya memberi informasi kepada pemakai yang berada diluar perusahaan atau *stakeholder* yang meliputi pemasok, pelanggan, pemegang saham, kreditor, investor besar, serikat kerja, analis keuangan, asosiasi *industry*, atau bahkan *public* secara umum”.

Menurut Bodnar dan Hopwood (2014:13), fungsi sistem informasi adalah sebagai berikut: “Fungsi sistem informasi bertanggung jawab atas pemrosesan data. Pemrosesan data sistem informasi dalam organisasi telah mengalami evolusi. Dulu, fungsi diawali dengan struktur organisasi yang sederhana, yang hanya melibatkan beberapa orang. Sekarang fungsi

tersebut telah berkembang menjadi struktur yang kompleks yang melibatkan banyak spesialis”.

Fungsi dari sistem informasi akuntansi merupakan menyediakan informasi yang dituangkan dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan baik oleh pimpinan maupun pihak yang berkepentingan untuk mengendalikan dan menilai efektivitas perusahaan.

- a. Fungsi lainnya yaitu untuk dapat menentukan hasil operasi perusahaan yang terdiri dari:
 - 1) Distribusi, yaitu memisahkan informasi-informasi ke dalam jumlah rupiah dan kuantitasnya dari suatu bukti transaksi.
 - 2) Pembuatan laporan manajemen.
- b. Untuk memelihara keamanan aktiva dan hutang perusahaan dengan membuat perkiraan (*account*) seperti kas, piutang, *inventory*, hutang dan sebagainya.
- c. Untuk melaksanakan suatu kegiatan perusahaan, misalnya *order* pembelian memerintahkan melakukan pembelian barang yang dibutuhkan.
- d. Mempermudah penyusunan rencana atau tindak lanjut pelaksanaan serta perbaikan dari rencana-rencana pelaksanaan yang kurang tepat.

Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi

Unsur-unsur dalam sistem informasi akuntansi terbagi dalam lima bagian, antara lain:

1) Prosedur

Tindakan yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Dalam suatu prosedur dapat melibatkan beberapa bagian.

2) Pencatatan

Kegiatan mencatat transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Pencatatan ini biasanya dalam bentuk jurnal.

3) Formulir

Dokumen tempat mencatat saldo dan berfungsi untuk mengatur berbagai kejadian atau transaksi yang ada dalam perusahaan.

4) Peralatan

Alat-alat yang digunakan untuk mencatat formulir-formulir, bisa berupa komputer, alat tulis dan sebagainya.

5) Manusia

Orang yang menjalankan sistem, memproses suatu informasi mulai dari proses pemasukan (*input*) sampai proses keluaran (*output*), yang harus menguasai bidang tertentu, mempunyai loyalitas, jujur, dapat dipercaya dan bertanggung jawab.

2.6. Manfaat Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Gondodiyoto (2007:124), Sistem informasi akuntansi memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Untuk melakukan pencatatan (*recording*) transaksi dengan biaya seminimal mungkin dan menyediakan informasi bagi pihak *intern* untuk pengelolaan kegiatan usaha serta para pihak terkait (*Stockholder or stakeholder*).
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasinya.
3. Untuk menerapkan (implementasi) sistem pengendalian *intern*, memperbaiki kinerja dan tingkat keandalan (*reliability*). Informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggung jawaban (akuntabilitas).
4. Menjaga atau meningkatkan perlindungan kekayaan perusahaan.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

3.1. Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Mangkunegara (2016: 40) kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya. Dengan adanya penjelasan mengenai kompetensi dan sumber daya manusia diatas kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah, namun penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu penyampaian informasi dalam laporan keuangan maka dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan

dapat dihemat. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Kompetensi sumber daya manusia sebagai karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Kompetensi sumber daya manusia juga merupakan bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat di prediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Dengan mengevaluasi kompetensi yang dimiliki seseorang, kita akan dapat memprediksikan kinerja orang tersebut. Karena itu dibutuhkan kemampuan atau kompetensi sumber daya manusia untuk menciptakan kinerja karyawan yang baik dan dapat berdampak positif bagi suatu perusahaan dan juga dapat meningkatkan kompetensi personal yang terlibat didalamnya. Kompetensi sumber daya manusia menurut hasil kajian Perrin (dalam Mangkunegara, 2016: 40) yaitu:

- 1) Memiliki kemampuan komputer (Eksekutif Lini).
- 2) Memiliki pengetahuan yang luas tentang visi.
- 3) Memiliki kemampuan mengantisipasi pengaruh perubahan.
- 4) Memiliki kemampuan memberikan pendidikan tentang sumber daya manusia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang berhubungan

dengan pengetahuan, keterampilan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

4. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan sebuah perusahaan tergantung dari seberapa besar informasi yang disajikan perusahaan bisa berguna bagi pengguna dan bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangan yang ada berdasarkan kerangka konseptual dan prinsip-prinsip dasar dan tujuan akuntansi. Baik buruknya kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari sehat atau tidak sehatnya perusahaan tersebut. Perusahaan yang sehat akan memiliki laporan keuangan yang berkualitas baik tanpa adanya penyimpangan. Laporan keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur atau menentukan sejauh mana kualitas perusahaan. Laporan keuangan memiliki kemampuan untuk menyajikan secara jelas kesehatan keuangan suatu perusahaan guna memberikan keputusan bisnis yang informatif. Laporan keuangan sangat penting bagi manajemen perusahaan pada khususnya untuk pengambilan keputusan dan penyusunan perencanaan. Oleh karena itu, informasi akuntansi yang diperoleh harus memenuhi kriteria tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh *Financial Accounting Standard Board* (FASB) dalam Baridwan (2013), adalah sebagai berikut:

“Kriteria utama informasi akuntansi adalah harus berguna untuk pengambilan keputusan. Agar dapat berguna, informasi itu harus mempunyai dua sifat

utama, yaitu relevan dan dapat dipercaya (*reliability*). Agar informasi itu relevan, ada tiga sifat yang harus dipenuhi yaitu mempunyai nilai prediksi, mempunyai nilai umpan balik (*feedback value*), dan tepat waktu. Informasi yang dapat dipercaya mempunyai tiga sifat yaitu dapat diperiksa, netral, dan menyajikan yang seharusnya. Disamping dua sifat utama, relevan dan dapat dipercaya, informasi akuntansi juga mempunyai dua sifat sekunder dan interaktif yaitu dapat dibandingkan dan konsisten.” Menurut Martani, dkk (2014:54), laporan keuangan memiliki beberapa karakteristik utama yaitu adalah relevan, andal dan dapat dipahami. Karakteristik tersebut harus dipenuhi agar laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna untuk pengambilan keputusan.

Menurut Hery (2017:3), Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

Kondisi kualitas laporan keuangan memperlihatkan bagaimana keadaan dari keuangan perusahaan pada periode periode tertentu. Gambaran dari kinerja manajemen sebuah perusahaan juga dapat dilihat dari bagaimana kualitas laporan keuangan perusahaan tersebut. Media yang dapat dipakai untuk dapat meneliti laporan keuangan perusahaan adalah laporan keuangan

yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, ikhtisar laba yang ditahan, dan laporan posisi keuangan. Pada perusahaan yang kondisinya buruk, banyak ditemukan indikator masalah (Irchamm, 2014). Menurut Fahmi dalam Fajri (2013:4) kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut: “Merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh suatu entitas pelaporan.”.

Laporan keuangan perusahaan akan menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Apabila laporan keuangan perusahaan berkualitas baik maka dapat dikatakan para pelaku usaha berhasil dalam menjalankan kegiatan usahanya dan telah mampu meminimalkan risiko penyimpangan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

4.1. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menetapkan empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Penyajian Jujur, informasi disajikan secara jujur sesuai dengan transaksi/peristiwa yang terjadi. Transaksi-transaksi tersebut diharapkan dapat disajikan secara wajar sebagaimana mestinya yang telah terjadi.
2. Dapat Diverifikasi (*verifiability*), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3. Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dilakukan dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan guna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

5. Pengertian Akuntabilitas Kinerja Lembaga

Akuntabilitas merupakan sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), kemampuan memberikan jawaban (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya. Akuntabilitas secara umum dapat diartikan sebagai permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya. Dalam tugasnya mengaudit laporan keuangan, auditor dituntut bekerja dengan akuntabilitas yang tinggi dan secara profesional. Hal ini untuk memenuhi permintaan klien yang menginginkan kinerja yang tinggi. Menurut Mahsun (2006:82) “pemerintahan yang baik harus memiliki akuntabilitas kinerja yang baik.” Akuntabilitas dalam sektor publik terdiri dari:

1. Akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Makna akuntabilitas ini merupakan konsep filosofis inti dalam manajemen sektor

publik. Dalam konteks organisasi pemerintah, sering ada istilah akuntabilitas publik yang berarti pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Akuntabilitas berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggung jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dalam sebuah rantai komando formal. Pada era desentralisasi dan otonomi daerah, para manajer publik diharapkan bisa melakukan transformasi dari sebuah peran ketaatan pasif menjadi seorang yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan standar akuntabilitas yang sesuai dengan keinginan dan harapan publik. Oleh karena itu, makna akuntabilitas menjadi lebih luas dari sekedar proses formal dan saluran untuk pelaporan kepada otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas harus merujuk kepada sebuah spektrum yang luas dengan standar kinerja yang bertumpu pada harapan publik sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja, responsivitas, dan juga moralitas dari para pengemban amanah publik. Konsepsi akuntabilitas dalam arti luas ini menyadarkan kita bahwa pejabat pemerintah tidak hanya bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi dalam rantai komando institusional, tetapi juga bertanggung jawab kepada masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan banyak *stakeholders* lain. Jadi, penerapan akuntabilitas ini, di samping berhubungan dengan penggunaan kebijakan

administratif yang sehat dan legal, juga harus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat atas bentuk akuntabilitas formal yang ditetapkan.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu (1) akuntabilitas vertikal dan (2) akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Pertanggung jawaban horisontal adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat luas.

2. Akuntabilitas dengan responsibilitas.

Menurut Donaldson et al.(1991), bahwa “konsep akuntabilitas ini sering dipahami dalam dua pengertian, (1) berkaitan dengan *virtually interchangeable* (dapat dipertukarkan dengan sebenar-benarnya), dan (2) berkaitan dengan *closely related* (terdapat saling keterkaitan yang bersifat tertutup).” Sementara itu, responsibilitas mempunyai sejumlah konotasi termasuk di dalamnya kebebasan untuk bertindak, kewajiban untuk memuji dan menyalahkan, dan perilaku baik yang merupakan bagian dari tanggung jawab seseorang. Menurut Mahsun (2006:84) bahwa ruang lingkup akuntabilitas tidak hanya pada bidang keuangan saja, tetapi meliputi:

- a. *fiscal accountability*;
- b. *legal accountability*;
- c. *program accoutability*;
- d. *process accountability*; dan
- e. *outcome accountability*.

3. Akuntabilitas dan *stewardship*

Istilah akuntabilitas juga sering dipersamakan dengan *stewardship* yaitu keduanya merupakan pertanggung jawaban. Sebenarnya, akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang yang diberi amanah kepada pemberi tanggung jawab dengan kewajiban membuat pelaporan dan pengungkapan secara jelas.

4. Dimensi akuntabilitas.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggung jawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood dalam Mardiasmo (2002:21) menjelaskan empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*Accountability for Probity and Legality*). Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap

hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

- b. Akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, *responsive*, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Yang harus dicermati dalam kontrak tender adalah apakah proses tender telah dilakukan secara *fair* melalui *Compulsory Competitive Tendering* (CCT), atukah dilakukan melalui korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- c. Akuntabilitas program. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

d. Akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.”

6. Kajian Riset Terdahulu

Kajian riset terdahulu yang telah meneliti pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Dampaknya Pada Akuntabilitas Kinerja Lembaga. Berikut penelitian terdahulu:

Penelitian mengenai pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan yang dilakukan oleh Armel (2017) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra dan Putra (2014) mengenai pemahaman standar akuntansi pemerintah menunjukkan hasil bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan daerah. Penelitian lain Nguyen Thanh Cuong (2017), *The quality of information must first appropriate and honest then to improve the quality of information, the information will have to show the ability to compare and understand. To improve the quality of information presented in the annual report to increase the information.*

Surastiani (2015) hasil penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan hasil bahwa Kompetensi SDM secara bersama-sama yang berpengaruh positif signifikan

terhadap kualitas LKPD. Penelitian yang dilakukan Diah dan Hari (2015) melakukan penelitian mengenai *the effect of internal accountants' competence on the quality of financial reporting and the impact on the financial accountability* dan mendapatkan hasil bahwa *the internal accountants' competence has signification effects on the quality of financial reporting, financial reporting quality significant effect on the financial accountability*. Penelitian lain menurut Nunuy Nur Afiah (2014), *The results of this research show that: (1) From the results of test Krusskal Wallis, there are no significant differences between Apparatus Competence and Internal Control, quality financial reporting and the good government governance in 7 local government (2) Apparatus Competence and Internal Control have significant effect on the Quality of Financial Reporting, partial and simultaneously. Furthermore it was found that the Quality of Financial Reporting has implications for Good Government.*

Selanjutnya, Diah dan Hari (2015) melakukan penelitian mengenai kualitas laporan keuangan dan dampaknya pada akuntabilitas publik menunjukkan bahwa *the effect of internal accountants' competence on the quality of financial reporting and the impact on the financial accountability dan mendapatkan hasil bahwa the internal accountants' competence has signification effects on the quality of financial reporting, financial reporting quality significant effect on the financial accountability*. Penelitian lain Nugraeni dan Budiantara (2015), menyebutkan *Research results are that the variable of government accounting standards application affects the quality of the financial statements, but does not directly influence the performance accountability. On the other hand the quality*

of financial statements directly affects the performance accountability. Finally, the new structure which is formed from path analysis is being supported by empirical evidences. Selanjutnya adalah ringkasan penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Media Publikasi	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Raja Yoga Gustika Armel (2017)	JOM Fekon, Vol.4 No.1 (Februari) 2017	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai)	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
2	Yuliani, dkk (2010)	Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol 3.No.2 Hal. 206-20	Pengaruh Pemahaman SAP, Pemanfaatan SIAKD, bagian akuntansi atau penata usaha keuangan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan pemanfaatan SIAKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3	Mahaputra dan Putra (2014)	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.2 (2014): 230-244	Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar
4	Dyah Puri Surastiani (2015)	Jurnal Dinamika Akuntansi Vol 7, No. 2 September 2015, PP 139-149 Issn 2085-4277	Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan pemerintah Daerah	Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5	Hasan Anisma (2014)	JOM FEKON Vol.1 No. Oktober 2014	Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAKD, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Kuantan Singingi)	Kompetensi Sumber Daya Manusia dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terdapat pengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
6	Diani (2013)	<i>E-Journal</i> Vol 2 No.1 Universitas Negeri Padang	Pengaruh pemahaman SIAKD, terhadap kualitas LKPD (Studi Empiris pada SKPD kota Pariaman	Pemahaman sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

7	Mahaputra dan Putra (2014)	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.2 (2014): 230-244	Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemahaman sistem informasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar
8	Nunuy Nur Afiah (2014)	<i>International Journal of Business, Economics and Law</i> , Vol. 5, Issue 1 (Dec.) ISSN 2289-1552	<i>Factors Influencing The Quality Of Financial Reporting And Its Implications On Good Government Governance</i>	<i>Apparatus Competence and Internal Control have weak positive effect on the Quality of Financial Reporting. Furthermore it was found that the Quality of Financial Reporting has moderate positif effect for Good Government Governance</i>
9	Julita, Susilatri (2018)	<i>International Journal of Scentific & Technology Reseach</i> Volume 7, Issue 2, February 2018 ISSN 2277-8616	<i>Analysis Of Factor Affecting The Quality Of Government Financial Report Bengkulu Regency</i>	<i>the Quality of Human Resources, Internal Control, and Utilization Technology affect positive the Quality of Financial Statements of Bengkulu Regency Government. While the application of SAP has no effect on the Quality of Financial Statements of Bengkulu Regency Government</i>
10	Nguyen Thanh Cuong (2017)	<i>International Research Journal of Finance and Economics</i> ISSN 1450-2887 Issue 160 March, 2017	<i>Measuring and Assessing the Quality of Information on the Annual Reports: The Case of Seafood's Companies Listed on the Vietnam Stock</i>	<i>The quality of information must first appropriate and honest then to improve the quality of information, the information will have to show the ability to compare and understand. To improve the quality of information presented</i>

			<i>Market</i>	<i>in the annual report to increase the information</i>
11	Omran Ahmad Mohammad Al-Ibbini (2017)	<i>International Journal of Economics and Finance; Vol. 9, No. 12; 2017 ISSN 1916-971X E-ISSN 1916-9728</i>	<i>The Critical Success Factors Influencing the Quality of Accounting Information Systems and the Expected Performance</i>	<i>The relationship between The Quality of Accounting Information Systems, human resources, The Expected Performance is statistically significant</i>
12	Darwanis dan Chairunnisa (2013)	Jurnal Tela'ah dan Riset Akuntansi Vol 6 No 2 Juli 2013 Hlm 150-174	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<i>The application of the area of financial accounting, financial reporting quality control positive affect the performance accountability of government agencies in Aceh. Oversight of financial reporting quality positife effect on performance accountability of government agencies in Aceh .</i>
13	Tambingon, Henny N. dkk (2018)	<i>International Journal of Economics and Financial Issues, Vol 8. Issue 2. 2018. ISSN: 2146-4138</i>	<i>Determinant Factors Influencing The Quality Of Financial Reporting Local Government In Indonesia</i>	<i>The commitment apparatus, role of internal audit have a significant effect on the quality of accounting information systems. Furthermore it was found that the quality of accounting information system has implications for the quality of financial reporting</i>

14	Nugraeni dan Budiantara (2015)	Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis Vol. 12 No. 1 Maret 2015	<i>Effect Of Government Accounting Standards On The Quality Of Financial Statements And Its Implications On Performance Accountability</i>	<i>The variable of government accounting standards application positive affects the quality of the financial statements, but does not directly influence the performance accountability. On the other hand the quality of financial statements directly affects the performance accountability.</i>
15	Anggriawan dan Yudianto (2018)	<i>Journal of Accounting Auditing and Business – Vol.1, No.1, 2018</i>	<i>Factors Affecting Information Quality of Local Government Financial Statement</i>	<i>Application of Government Accounting Standards, the quality of human resources has a positive effect on the quality of information on the Financial Statements of West Bandung Regency</i>
16	Hari Setiyawati , Diah Iskandarnuru (2015)	<i>International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR) Volume 3, Issue 5, May 2015, PP 55-64 ISSN 2349-0330 (Print) & ISSN 2349-0349 (Online)</i>	<i>The Effect of Internal Accountants' Competence on the Quality of Financial Reporting and the Impact on the Financial Accountability</i>	<i>The Internal Accountants' Competence has signification effects on the Quality of Financial Reporting, Financial Reporting Quality significant effect on the Financial Accountability</i>
17	Siti Chodijah dan Nurul Hidayah (2018)	Jurnal Tekun. Vol 8. No. 1. Maret 2018	<i>Pengaruh Pemanfaatan Informasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	<i>Information system technology significant effect on the quality of local government financial reporting.</i>

18	(M.Ali Fikri Biana Adha Inapaty dan RR. Sri Pancawati Martiningsih.2016)	Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volum 9 (I) April 2016 P-ISSN:1979-858X; E-ISSN: 2461-1190	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.	Standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada (Satuan Kerja Perangkat Daerah) SKPD Pemerintah Pemprov NTB.
----	--	---	--	---

B. Rerangka Pemikiran

Berdasarkan urutan teoritis dan tinjauan penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini disajikan dua variabel independen, yaitu standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia. Sedangkan variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja lembaga. Berikut gambar kerangka pemikirannya:

1. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemakaian standar akuntansi ini cenderung dilakukan karena dapat memperbaiki sistem yang sudah dipergunakan sebelumnya, sehingga informasi keuangan sebagai bahan pengguna laporan keuangan menjadi lebih akurat dan kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat dihindarkan.

Standar akuntansi pemerintah yang baik akan menghasilkan kualitas yang handal dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan kata lain, laporan

keuangan yang relevan disebabkan karena pemahaman yang baik akan berbasis akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan penyajian yang lengkap atas seluruh informasi.

Armel (2017), menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dalam penelitian tersebut pemahaman standar akuntansi pemerintah akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Megawati, dkk (2015), Udiyanti, dkk (2014), Armel (2017), Wati, dkk (2014), Diani (2013), Yuliani, dkk (2010) dan Nugraheni, dkk (2008), Anggriawan dan Yudianto (2018), menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah yang berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

2. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah

Sistem informasi akuntansi keuangan merupakan sistem informasi yang digunakan dalam mencatat transaksi-transaksi keuangan pemerintah dan membantu dalam menyusun laporan keuangan. Menurut Silviana (2013), sistem informasi akuntansi keuangan dapat dievaluasi sebagai nilai tambah dalam kinerja pemerintah. Sistem informasi akuntansi yang benar akan memudahkan dalam menyediakan informasi yang handal, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal itu dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang dapat disajikan kepada masyarakat, serta meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Diani (2013), menyatakan

bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dalam penelitian itu menyatakan bahwa semakin baik pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan meningkat.

Penelitian lain yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah adalah Megawati, dkk (2015), Wati, dkk (2014), Yensi, dkk (2014), Nguyen Thanh Cuong (2017), Omran Ahmad Mohammad Al-Ibbini (2017) dan Yuliani, dkk (2010).

3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan

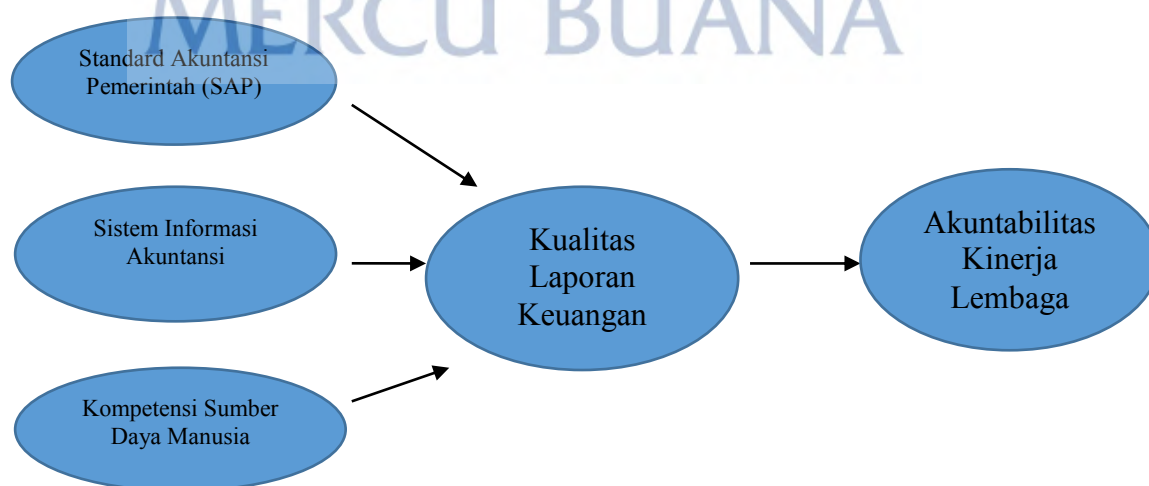
Surastiani (2015) mengemukakan bahwa semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan pun akan semakin baik. Sumber daya manusia yang paham akuntansi pemerintah dan memiliki pengalaman pada pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan untuk dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik. Megawati, dkk (2015), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap laporan keuangan pemerintah. Dalam penelitian itu menyatakan bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia (SDM) maka kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan. Penelitian tersebut sama dengan hasil penelitian Wati,

dkk (2014), Afiah (2014), Julita (2018), Anggriawan dan Yudianto (2018) dan Isthika, dkk (2014).

4. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Lembaga

Darwanis dan Chairunnisa (2013) mengemukakan bahwa pengawasan kualitas laporan keuangan memiliki korelasi positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas. Sementara itu, pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPA, maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Suatu instansi pemerintah sudah pasti diawasi oleh pihak internal dan eksternal dalam setiap proses pencapaiannya, namun sistem pengawasan internal instansi pun mutlak menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Hal ini dapat dilihat dimana beberapa SKPA yang ada sudah menggunakan sistem otorisasi yang tepat untuk mengelola keuangannya. Namun ternyata faktanya, masih banyak laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah tidaklah memenuhi karakteristik kualitatif sebuah laporan keuangan, hal ini akan sangat menghambat terwujudnya akuntabilitas kinerja dan hal ini akan membuat proses kerja instansi tidak sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan

pemerintah yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 atau yang telah direvisi menjadi Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang harus dilaksanakan dengan tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Iskandar dan Hari Setiyawati (2015) menunjukkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas berdampak positif terhadap akuntabilitas publik. Hal ini berarti bahwa laporan keuangan yang berkualitas diyakini memberikan kepercayaan yang lebih dari publik sehingga harapan masyarakat akan adanya keterbukaan dari pemerintah dan pada gilirannya akan meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas publik dapat terwujud. Penelitian tersebut sama dengan hasil penelitian Darwanis dan Chairunnisa (2013), Nugraeni dan Budiantara (2015) dan Omran Ahmad Mohammad Al-Ibbini (2017).



Gambar 2.1
Rerangka Pemikiran Penelitian

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Berdasarkan kajian teoritis, konsep penelitian dan rerangka pemikiran seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
- H₂: Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
- H₃: Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
- H₄: Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan dan Dampaknya pada Akuntabilitas Kinerja Lembaga.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

BAB III

DESAIN DAN METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kasual (*causal associative research*). Menurut Sasnusi (2011), assosiatif kausal adalah penelitian yang mencari pengaruh antara dua variabel atau lebih. Tujuan dari penelitian asosiatif adalah untuk mencari pengaruh antara satu dengan variabel lain.

Pada penelitian ini, menggunakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survei. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menurut Sujarweni (2014:39) adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran)". Penelitian ini menggunakan lima variabel yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintah (X_1), sistem informasi akuntansi (X_2), dan kompetensi sumber daya manusia (X_3) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) dan dampaknya terhadap akuntabilitas kinerja lembaga (Z). Penelitian kuantitatif ini akan lebih banyak menggunakan angka-angka yang kemudian akan dideskripsikan menjadi suatu hasil.

B. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan berikut dengan operasional dan cara pengukurannya. Definisi operasionalisasi variabel adalah dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, *instrument* serta sumber

pengukuran berasal dari mana. Dalam penelitian ini menggunakan 5 (lima) variabel yang akan dilakukan pengujian yaitu:

1) Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (X_1)

Pemahaman standar akuntansi pemerintah merupakan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Terdapat 13 (tiga belas) PSAP yang dapat dijadikan dimensi dalam penelitian ini yaitu: Penyajian Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Akuntansi Persediaan, Akuntansi Investasi, Akuntansi Aset Tetap, Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, Akuntansi Kewajiban, Koreksi Kesalahan, Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Operasional dan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

2) Sistem Informasi Akuntansi (X_2)

Sistem informasi akuntansi adalah penerapan sistem informasi akuntansi tersebut oleh masing-masing SKPD dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Terdapat 5 (lima) unsur-unsur sistem informasi akuntansi yang dapat dijadikan dimensi dalam penelitian ini yaitu prosedur, pencatatan, formulir, peralatan dan manusia.

3) Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (X_3)

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Ada tiga

dimensi kompetensi sumber daya manusia yaitu: pengetahuan, *skill* dan perilaku.

4) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan nilai dari hasil laporan keuangan yang mencakup unsur-unsur yaitu Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

5) Akuntabilitas Kinerja Lembaga (Z)

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program dan Akuntabilitas kebijakan.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran	No. Kuesioner
Standar Akuntansi Pemerintah (X ₁) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 SAP	1. Penyajian Laporan Keuangan	1. Prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan	Interval	A.1
		2. Menerapkan basis akrual	Interval	A.2
		3. Penerapan basis akrual mengakui kewajiban	Interval	A.3
		4. Penerapan basis kas mengakui pendapatan dan belanja	Interval	A.4
	2. Laporan Realisasi Anggaran	1. Mencatat Pendapatan asas Bruto	Interval	A.5
		2. Pengeluaran Kas diakui belanja	Interval	A.6
	3. Laporan Arus Kas	1. Penyajian laporan arus sesuai SAP	Interval	A.7
		2. Metode langsung melaporkan arus kas operasi	Interval	A.8
	4. Catatan Atas Laporan Keuangan	1. CaLK disajikan pada setiap periode	Interval	A.9

		2. CaLK meliputi pos dalam LK	Interval	A.10
Sistem Informasi Akuntansi (X ₂) <i>Bodnar dan Hopwood (2014:13)</i>	5. Akuntansi Persediaan	1. Pengakuan Persediaan saat diterima	Interval	A.11
		2. Pencatatan dilakukan berdasarkan inventarisasi fisik	Interval	A.12
	6. Akuntansi Investasi	1. Kas di akui sebagai investasi	Interval	A.13
		2. Mencatat investasi sebesar biaya perolehan	Interval	A.14
	7. Aset Tetap	1. Klasifikasi Aset Tetap berdasarkan operasi entitas	Interval	A.15
		2. Mencatat asset tetap sebesar biaya perolehan	Interval	A.16
	8. Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan	1. Pengungkapan Kontruksi dalam pengerjaan pada akhir periode	Interval	A.17
		2. Memindahkan konstruksi dalam pengerjaan asset jika konstruksi telah selesai	Interval	A.18
	9. Akuntansi Kewajiban	1. Mengakui Kewajiban pada saat dana pinjaman diterima	Interval	A.19
		2. Mencatat kewajiban sesuai dengan nilai nominal	Interval	A.20
	10. Koreksi Kesalahan	1. Koreksi kesalahan yang ditemukan	Interval	A.21
		2. Tindakan pembetulan pos pos tersaji sesuai seharusnya	Interval	A.22
	11. Laporan Keuangan Konsolidasi	1. Menyajikan laporan keuangan konsolidasi	Interval	A.23
2. Mencangkup semua laporan keuangan dari semua entitas		Interval	A.24	
12. Laporan Operasional	1. Menyusun laporan operasional pada periode akuntansi	Interval	A.25	
	2. Mencangkup Pendapatan, beban, transfer, dan pos - pos	Interval	A.26	
13. Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum	1. Laporan keuangan berbasis akrual.	Interval	A.27	
	2. Menerapkan pola pengelolaan keuangan diberikan fleksibilitas	Interval	A.28	
1. Prosedur	1. Memahami prosedur sistem informasi akuntansi	Interval	B.1	
	2. Prosedur dan Sistem telah ditetapkan	Interval	B.2	
2. Pencatatan	1. Kegiatan transaksi dicatat oleh fungsi akuntansi	Interval	B.3	

		2. Mencatat setiap transaksi terjadi	Interval	B.4
	3. Formulir	1. Nomor urut yang digunakan	Interval	B.5
		2. Formulir transaksi yang digunakan tercantum nomor urut tercetak	Interval	B.6
	4. Peralatan	1. Alat-alat yang efektif	Interval	B.7
		2. Alat-alat yang efisien	Interval	B.8
	5. Manusia	1. Pelatihan tenaga kerja	Interval	B.9
		2. Pengarahan tenaga kerja	Interval	B.10
Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (X ₃) Mangkunegara (2016:40)	1. Pengetahuan	1. Mengetahui tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, dan siklus akuntansi	Interval	C.1
		2. Memahami tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, dan siklus akuntansi	Interval	C.2
	2. Skill atau Kemampuan	1. Menyusun tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, dan siklus akuntansi	Interval	C.3
		2. Menyajikan tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, dan siklus akuntansi	Interval	C.4
	3. Prilaku	1. Kontrol terhadap SDM setelah pelatihan	Interval	C.5
		2. Kontrol terhadap SDM setelah pengarahan	Interval	C.6
Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 SAP	1. Tingkat Relevansi	1. Mengoreksi keputusan masa lalu (<i>Feedback Value</i>)	Interval	D.1
		2. Tersusun dengan tepat waktu	Interval	D.2
		3. Tersusun lengkap semua informasi	Interval	D.3
	2. Tingkat Keandalan	1. Informasi di sajikan dengn jujur	Interval	D.4
		2. Dapat Diverifikasi kebenarannya	Interval	D.5
		3. LK Netralitas dan	Interval	D.6

		memenuhi kebutuhan		
	3. Tingkat Keterbandingan	1. Dapat di bandingkan Dengan Periode Sebelumnya	Interval	D.7
	4. Tingkat Keterpahaman	1. Pemahaman para pengguna	Interval	D.8
		2. LK disusun sistematis	Interval	D.9
Akuntabilitas Publik (Z) Mardiasmo (2002:21)	1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum	1. Struktur Organisasi	Interval	E.1
		2. Kepatuhan terhadap hukum	Interval	E.2
	2. Akuntabilitas Proses	1. Sistem informasi akuntansi kecukupan	Interval	E.3
		2. Pengawasan terhadap pelaksanaan	Interval	E.4
		3. Pemeriksaan Pengawasan terhadap pelaksanaan	Interval	E.5
	3. Akuntabilitas Program	1. Tujuan yang di tetapkan	Interval	E.7
		2. Manfaat dan dampak yang diberikan	Interval	E.8
	4. Akuntabilitas kebijakan	1. Kebijakan laporan setiap kegiatan	Interval	E.9
		2. Pertanggung jawaban setiap kegiatan	Interval	E.10

Sumber: Kajian teoritis di olah (2019).

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Lembaga Sertifikasi Kompetensi Teknisi Akuntansi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Formal dan Non Formal. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah lembaga yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sub sektor Lembaga Sertifikasi Kompetensi Teknisi Akuntansi Bond'09 sebanyak 77 lembaga yang dapat digunakan menjadi sampel dalam penelitian ini. Dari jumlah populasi tersebut digunakan sampel sebagai sumber penelitian. Menurut Sugiyono (2017:137), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan

sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel anggota populasi dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Dalam pemilihan sampel, penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, yaitu:

1. Lembaga yang diambil populasinya adalah lembaga sertifikasi kompetensi teknisi akuntansi bond'09 yang terdaftar di kementerian pendidikan dan kebudayaan formal dan non formal.
2. Lembaga yang di bawah naungan lembaga sertifikasi kompetensi teknisi akuntansi bond'09 yang aktif dalam setiap kegiatannya.
3. Lembaga yang di bawah naungan lembaga sertifikasi kompetensi teknisi akuntansi bond'09 yang sudah lebih dari 5 tahun.
4. Laporan kepada lembaga sertifikasi kompetensi teknisi akuntansi bond'09 memiliki kelengkapan data dalam penelitian. Adapun perhitungan pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Tabel 3.2
Pemilihan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Populasi: Lembaga Sertifikasi Kompetensi Akuntansi Bond'09 yang terdaftar selama periode penelitian.	77
2.	Lembaga yang tidak aktif dalam setiap kegiatan	(10)
3.	Lembaga yang periode nya belum sampai 5 tahun	(18)
4.	Laporan lembaga tidak memiliki kelengkapan data untuk variabel dalam penelitian	(10)
	Jumlah Sampel	39

Sumber: Data Diolah (2019)

Berdasarkan tabel kriteria penentuan sampel, diperoleh jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) lembaga. dimana dalam perolehan data penelitian ini menggunakan kuesioner yang akan dikirimkan kepada setiap pimpinan lembaga Sertifikasi teknis akuntansi bond'09, dengan rincian daftar sampel pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Daftar Sampel Lembaga Sertifikasi Kompetensi Teknisi Akuntansi
Bond' 09 periode 2013 - 2018

No.	No. Surat Keputusan	No. Register	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Pimpinan Lembaga
1	002/SK/VI/09	001 – 11730	LPBM PEMBINA	Jln. Daan Mogot KM 13,5 No. 9 Cengkareng Timur, Jakarta Barat	SH. Bakri
2	003/SK/VI/09	002 – 10430	TLC Yayasan Administrasi Indonesia	Jln. Pangeran Diponegoro No.74 Jakarta Pusat	Slamet Ampera
3	008/SK/VI/09	008 – 35142	LPBM TEKNOKRAT	Jln. Zainal Abidin No.9-11, Pagar Alam, Kedaton Bandar Lampung	Nasrullah Yusuf

4	012/SK/VI/09	012 – 41115	SMK BINA BUDI	Jln. Veteran No.180, Purwakarta (Kebon Kolot) Belakang Mesjid Al Magrifah)	Tati Supryanti
5	013/SK/VI/09	013 – 44151	LPK JURNAL	Jln. Patriot No. 56, Taragong Kidul Garut	Aen Karnaen
6	014/SK/VI/09	014 – 57215	LPK TRIJAYA HIKMAH SMK I MUHAMADIYAH I	Jln. Rajawali No.1, Nglorok, Kabupaten Sragen	Rini Triningsih
7	015/SK/VI/09	015 – 57468	LPK NUR FIKRI SMK PGRI Pedan	Jln. Res 2 Kedungan, Kec. Pedan Kabupaten Klaten	Suwarno
8	016/SK/VI/09	016 – 55812	LPK KARISMA	Jln. Veteran Wonosari - Gunung Kidul	Abdul Rochim
9	017/SK/VI/09	017 – 55151	LPK MAGISTRA UTAMA	Jln. Ipda Tut Harsono No. 49 Timoho Yogyakarta	Jaryanto / Asri
10	019/SK/VI/09	019 - 65148	SMKN 1 MALANG	Jln. Sono Kembang Janti Kotak Pos 108 Malang	Panca Susilawati
11	021/SK/VI/09	021 - 64114	LPK PIONIR (SMKN 2 Kediri)	Jln. Veteran V Kota Kediri	Djoko Supriadi
12	022/SK/VI/09	022 – 63146	WIDYA WIYATA (SMKN 1 Ponorogo)	Jln. Jend. Sudirman No.10, (Sebelah Timur Alun-Alun Ponorogo)	Mustari
13	035/SK/II/10	029 - 45312	YAYASAN PENDIDIKAN ACTUAL/LPKMA SUMEDANG	Jl. Prabu Geusan Ulun, No.123 Sumedang Jawa Barat	Eti Rusmiati
14	037/SK/P-TUK/II/10	031 - 66217	KRESNA INFORMATIKA	Jln. Yos Sudarso No. 108 Tulung Agung	Usup
15	038/SK/P-TUK/II/10	032 - 54364	TAMTAMA KARANG ANYAR	Jl. Kemakmuran No. 39 Karanganyar	Agus Riyono
16	039/SK/P-TUK/II/10	033 - 50517	WIDYA KARYA	Jl. Jend. Gatot Subroto No.63 Unggaran Kab. Semarang	Eko Susanto
17	040/SK/P-TUK/II/10	034 - 58311	LKP LPPI CEPU	Jl. Ronggolawe No.115 Cepu Blora	Edy Suwito
18	046/SK/P-TUK/IV/10	037 - 55552	LPK BINA KARYA	Jl. Magelang Km. 17, Tempel, Sleman Yogyakarta 55552	Ery Widaryana
19	047/SK/P-TUK/IV/10	038 - 57120	LPK ISTIBANK	Jl. IR. Sutami No. 46 Sekarpace, Jebres, Surakarta	Joko Sutrisno
20	049/SK/P-TUK/V/10	040 - 83126	HARAPAN BANGSA	Jl. Pemuda No. 18. Mataram , NTB	Sainun
21	054/SK/P-TUK/V/10	045 - 45511	LKP KILAT	Jl. Otista No. 93 Kuningan	Fajar Febriansyah
22	055/SK/P-TUK/V/10	046 - 53223	SWK KOMPUTER	Jl. Tengger No. 22 Cilacap RT 04 RW 01 Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Jawa Tengah	Kardiyanto Indra Purnomo
23	058/SK/P-TUK/V/10	049 - 57214	LPK SUCCESS	Jln. Ronggowarsito, Sragen	Yunanto Ari Prabowo

24	080/SK/P-TUK/XII/10	053-67239	SMKN 1 PROBOLINGGO	Jln. Mastrip No. 357 Kel. Jrebeg Wetan Kec. Kedupok Kota Probolinggo Jawa Timur	Drs. Pujiana M.MPd/Ririn Herawati
25	0120/SK/P-TUK/X/11	057 - 67184	UPT SMK NEGERI 1 GRATI	Jl. Raya Ngopak No. 1 Kec. Grati Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur	Ir. Dadik Hariadi
26	0150/SK/P-TUK/VII/12	063-58113	LKP HARAPAN (SMK 1 N Purwodadi)	Jl. P. Diponegoro No.24 Purwodadi, Grobongan, Jawa Tengah	Drs. Mulyono
27	0151/SK/P-TUK/VIII/12	064-57434	SMK NEGERI 1 KLATEN	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 22 Klaten, Jawa Tengah	Eko Subadri
28	0152/SK/P-TUK/VIII/12	065-61219	SMK NEGERI 2 BUDURAN SIDOARJO	Jl. Jenggolo No. 2A Siwalanpanji, Buduran Kab.Sidoarjo, Jawa Timur	Dra. Pudji Suminiwati, MM
29	0164/SK/P-TUK/XI/12	069-65175	SMKN 1 TUREN	Jl. Panglima Sudirman No. 41. Kel. Turen Kec. Turen Kab. Malang,	Agus Suyanto
30	0217/SK/P-HUK/II/13	071-40523	SANTA MARIA	Jl. Jend. Gatotsubroto No.6 Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat	Tutik Lestari
31	0217/SK/P-HUK/II/13	073-74322	LPP QUANTUM	Jl. S. Parman No.22A Sampit, Kalimantan Tengah	Eddy Sabarudin
32	015/SK/P-HUK/III/14	075-57222	LPK WIDYA KARYA	Jl. Candibaru, Plumbungan, Karangmalang, Sragen, Provinsi Jawa Tengah	Riyanto
33	018/SK/P-HUK/XII/14	077-45153	LKP COMPUTER CENTRE CIREBON (3C)	Jl. Simega No.111 Kertawinangun, Kanupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat	Veronika Nhadinah
34	000/SK/P-HUK/II/00	079-36135	PPLK BINTANG NUSANTARA	Jl. Kapten UD Sunaryo RT.08 Kel. Talang Bakung, Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, 36135	Amir M
35	000/SK/P-HUK/II/01	082-73112	LKP ELTIBIZ	Jl. Jilik Riwut Km. 1.5 No.4 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan tegah , 73112	Rizki Mahendra
36	000/SK/P-HUK/II/02	083-57113	SMKN 1 SURAKARTA	Jl. Sungai Kapuas No.28, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.	Lestari
37	000/SK/P-HUK/II/04	085-28153	LPP UNIVERSAL SKILL	Jl. Yos Sudarso No.2D Kec. Senaplan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, 28153	Indra
38	000/SK/P-HUK/II/05	086-62271	LKP ANDIKA	Podang Indah RT.04/III, Ds. Karang Kembang, Kec. Babat, Kab. Lamongan, Jawa Timur 62271	Drs. Subagio, MM
39	000/SK/P-HUK/II/06	087-10710	LKP GEMINI	Jl. Kelinci III/15A Atas, RT.12/4 Kel. Pasar Baru, Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat	Drs. Gunawan K

Sumber: <http://www.infokursus.net/nipuk/infolsk.php>

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

a) Penelitian Lapangan

Dilakukan dengan mendatangi langsung tempat yang diteliti untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti melalui observasi, wawancara dan kuesioner.

b) Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

c) Wawancara

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

d) Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

2. Riset Perpustakaan (*Library Research*)

Dengan metode ini penulis akan memperoleh landasan teori dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur yang relevan

dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya.

E. Metode Analisis

Metode analisa data dalam penelitian ini adalah analisis kausalitas, yang mana bertujuan untuk menguji apakah satu variabel menyebabkan variabel yang lain berubah atau tidak, melalui pengujian hipotesis dengan menggunakan *Struktur Equation Model* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Analisis kausal dilakukan dengan metode SEM berbasis variance yaitu metode aplikasi PLS. Pemilihan pada model ini didasarkan pada jumlah sampel dibawah 50. Dan pada Model SEM PLS model pengukuran dibentuk oleh variabel yang memiliki indikator yang berbentuk refleksif.

Pengukuran pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan skala interval. Menurut Irianto (2014: 19), merupakan skala interval yaitu suatu skala yang mempunyai rentangan konstan antara tingkat satu dengan yang aslinya, tetapi tidak mempunyai angka 0 mutlak. Jenis skala pengukuran data yang dipakai peneliti adalah skala interval. Dengan skala interval, maka variabel yang akan

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Berikut ini adalah tabel skala *likert*:

Tabel 3.4
Skala *Likert*

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Sumber: Sugiyono (2016:93)

Selanjutnya data diperoleh dengan menggunakan kuesioner, dimana hasil analisis akan dipresentasikan dalam bentuk tabel. Menurut Sugiyono (2016:244), “Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”. Langkah-langkah analisis melalui Smart PLS adalah sebagai berikut:

1. Analisis *Partial Least Square*

Analisis *Partial Least Square* (PLS) bertujuan untuk mendapatkan hubungan variabel laten serta bertujuan memprediksi indikator-indikator struktural konstruk. Chin (1998) dalam Ghozali (2014) menyatakan bahwa karena PLS tidak mengasumsikan adanya distribusi tertentu untuk estimasi parameter, maka teknik parametrik untuk menguji signifikansi parameter tidak diperlukan. Model evaluasi PLS berdasarkan pada pengukuran prediksi yang mempunyai sifat non parametrik. Dalam model evaluasi PLS terdapat tahap-tahap sebagai berikut:

a. Model Pengukuran atau Outer Model

Ada tiga kriteria untuk pengukuran outer model yaitu *Convergent Validity*, *Discriminat Validity* dan *Composite Validity* dari model pengukuran dengan *indicator* refleksi dinilai berdasarkan korelasi antara skor item, yang dihitung dengan PLS. Ukuran refleksi individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Menurut Chin, untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai (Chin, 1998 dalam Ghozali 2014). Validitas konvergen juga dapat diketahui melalui *average variance extracted* (AVE). Suatu *instrument* dikatakan memenuhi pengujian validitas konvergen, apabila memiliki *average variance extracted* (AVE) lebih dari 0,500. Perhitungan yang dapat digunakan untuk menguji realibilitas dari indikator-indikator pembentuk variabel adalah *cronbach alpha* dan *composite reliability*. Kriteria pengujian menyatakan bahwa apabila *composite reability* bernilai lebih besar dari 0,700 dan *cronbach alpha* bernilai lebih besar dari 0,600 maka

variabel tersebut dinyatakan *reliabel*. *Discriminat validity* dari model pengukuran dengan indikator refleksi dinilai berdasarkan *cross loading* pengukuran. Jika korelasi konstruk lainnya, maka hal tersebut menunjukkan konstruk laten memprediksi ukuran blok lebih baik dari pada ukuran pada blok lainnya (Ghozali, 2014). Nilai $t\text{-statistic} \geq 1,645$ maka menunjukkan bahwa indikator tersebut sah (Yamin dan Kurniawan, 2011 dalam Uce Indahyanti, 2013).

b. Model Struktural atau Inner Model

Pengujian inner model atau model *structural* dengan PLS dimulai dengan melihat nilai R-square untuk setiap variabel laten independen. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah punya pengaruh yang substantif.

2. Pengujian Hipotesis

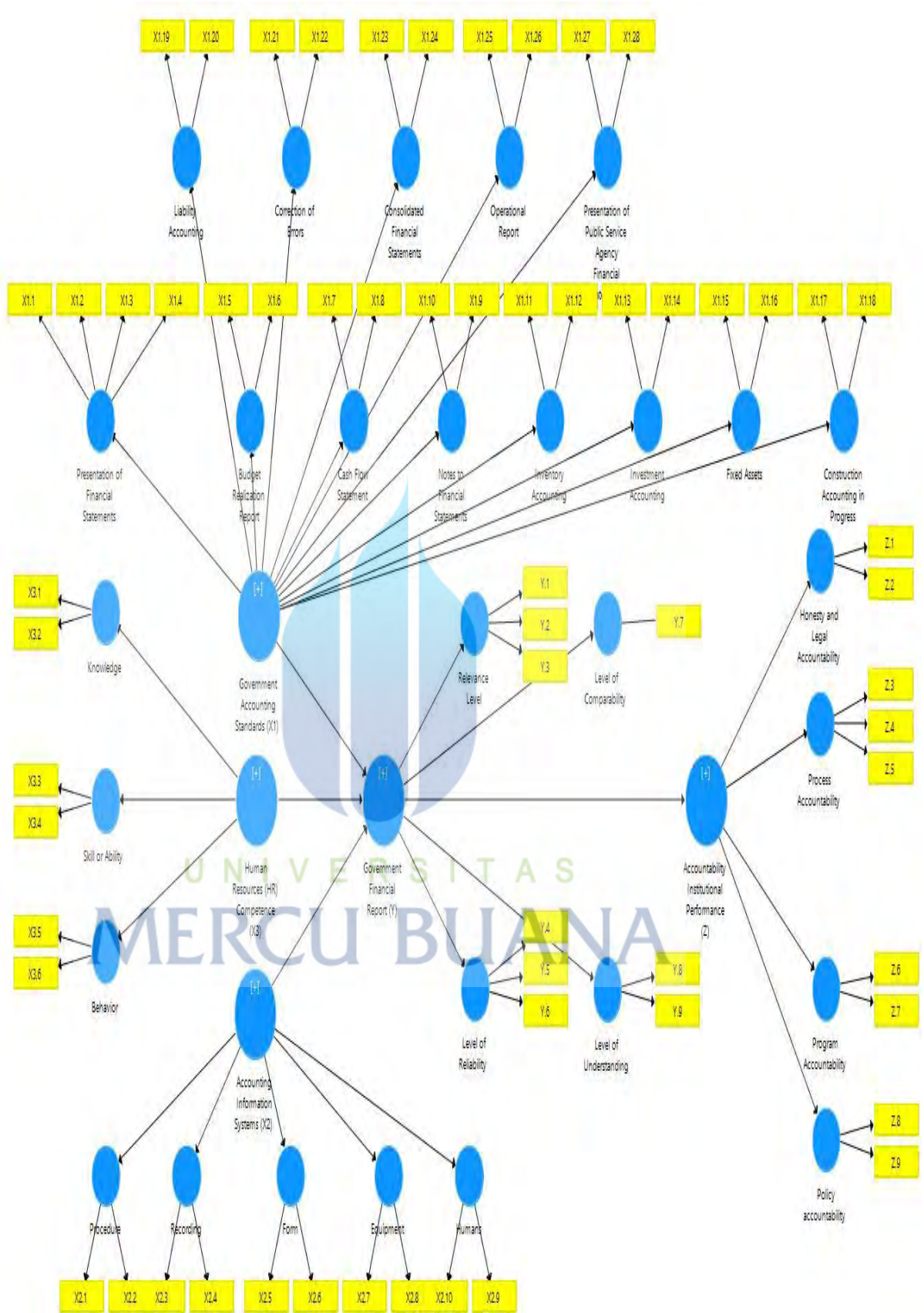
Pengujian seluruh hipotesis maka digunakan metode *Partial Partial Least Square* (PLS). *Partial least square* merupakan metode analisis yang *power full* oleh karena tidak didasarkan banyak (Ghozali, 2014). Metode PLS membuat model yang diuji dapat mempergunakan asumsi: data tidak harus berdistribusi normal, skala pengukuran dapat berupa nominal, ordinal, interval maupun rasio, jumlah sampel tidaklah harus besar indikator tidak harus dalam bentuk refleksi (dapat berupa indikator refleksi dan formatif) dan model tidak harus berdasarkan pada teori (Ghozali, 2014).

Uji t yaitu menguji signifikan konstantan dan variabel independen yang terdapat dalam persamaan tersebut secara individual dan apakah berpengaruh terhadap nilai variabel dependen (Ghozali, 2014). Pengujian ini dilakukan dengan melihat *output* dengan bantuan program aplikasi PLS. Jika nilai t hitung $< t$ table, maka hipotesis nol ditolak, (koefisien regresi signifikan) dan hipotesis alternatif yang dinyatakan dalam penelitian ini diterima pada tingkat signifikan 5% (lima persen). Pengukuran persentase pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen, ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi *R-square* (R^2) antara 1 dan 0, dimana *R-square* (R^2) yang mendekati satu memberikan persentase pengaruh yang besar (Ghozali, 2014). Model persamaan structural dalam penelitian ini akan diselesaikan dengan program PLS, yang akan nantinya hubungan antara konstruk digambarkan dalam *model structural* sebagai berikut:

Kriteria hipotesis pengujian dalam penelitian ini adalah taraf signifikansi (α) 5% dan ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika t hitung $> t$ tabel (2,042) maka hipotesis diterima
2. Jika t hitung $< t$ tabel (2,042) maka hipotesis ditolak





Gambar 3.1
Konstruksi Diagram Jalur

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencari pengaruh antara dua variabel atau lebih pada pemahaman standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dan dampaknya pada akuntabilitas kinerja publik. Populasi pada objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh lembaga yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sub sektor Lembaga Sertifikasi Kompetensi Teknisi Akuntansi Bond'09 sebanyak 77 lembaga, sampel yang dapat digunakan untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 39 lembaga, responden yang diterima dalam penelitian ini sebanyak 37 lembaga. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang diberikan langsung kepada responden di setiap institusi kepada pimpinan maupun penanggung jawab lembaga yang bertanggung jawab dalam menyusun dan melaporkan pengelolaan keuangan dari setiap anggaran yang diterima oleh lembaga. Kuesioner diedarkan dari tanggal 01 Maret 2020 – 30 September 2020. Jika dilihat dari tingkat pengembalian kuesioner ini termasuk sangat tinggi yaitu sebesar 94,87%. Total responden yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sebanyak 37 kuesioner. Data penelitian diperoleh dari responden yang mengembalikan atau mengisi kuesioner yang diberikan.

Adapun profil responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Sampel

Uraian	Frekuensi	Presentasi
Jenis Kelamin		
Pria	20	54.05 %
Wanita	17	45.95 %
Total	37	100%
Tingkat Pendidikan		
SMA/Sederajat	3	8.11%
S1	13	35.14 %
S2	19	51.35 %
S3	2	5.41 %
Total	37	100%
Masa Kerja		
5-15 Tahun	11	29.73 %
Di atas 15 Tahun	26	70.27 %
Total	37	100%

Sumber: Data Primer diolah 2020

Dari tabel disajikan data tentang jenis kelamin, tingkat pendidikan dan masa kerja responden. Jika dilihat dari jenis kelamin responden wanita lebih banyak daripada responden pria yaitu responden pria sebanyak 20 orang (54.05%), sedangkan wanita sebanyak 17 orang (45.95%). Dari tingkat pendidikan mayoritas yang mengisi kuesioner adalah tamatan S2 sebanyak 19 orang (51,35%) dan minoritas paling sedikit mengisi kuesioner adalah S3 sebanyak 2 orang (5.41%). Sedangkan berdasarkan masa kerja, responden dengan masa kerja diatas 15 tahun adalah yang paling banyak mengisi kuesioner yaitu sebanyak 26 orang (70.27%) dan repsonden yang paling sedikit mengisi kuesioner adalah dengan masa kerja dibawah 5-15 tahun yaitu sebanyak 11 orang (29.73%). Dari data tersebut dapat

disimpulkan bahwa hampir semua responden yang diteliti memiliki pengalaman yang sangat baik karena mereka telah memenuhi kriteria peneliti dalam lembaga sertifikasi kompetensi teknisi akuntansi bond'09 sehingga responden telah mengetahui dengan baik tata cara kerja pada proses bagian keuangan.

B. Analisis Deskriptif Variabel

1. Deskripsi Variabel Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah adalah pemahaman prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Variabel ini diukur dengan 13 dimensi dan 8 indikator yang bersifat reflektif, yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Deskripsi Variabel
Standar Akuntansi Pemerintah

No.	Dimensi	Indikator	Rata-Rata
1	Penyajian Laporan Keuangan	Prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan	4.541
2		Menerapkan basis akrual	4.297
3		Penerapan basis akrual mengakui kewajiban	4.189
4		Penerapan basis kas mengakui pendapatan dan belanja	4.135
5	Laporan Realisasi Anggaran	Mencatat Pendapatan asas Bruto	3.973
6		Pengeluaran Kas diakui belanja	3.919
7	Laporan Arus Kas	Penyajian laporan arus sesuai SAP	4.270
8		Metode langsung melaporkan arus kas operasi	3.946

9	Catatan Atas Laporan	CaLK disajikan pada setiap periode	4.351
10	Keuangan	CaLK meliputi pos dalam LK	4.378
11	Akuntansi	Pengakuan Persediaan saat diterima	4.324
12	Persediaan	Pencatatan dilakukan berdasarkan inventarisasi fisik	4.243
13	Akuntansi	Kas di akui sebagai investasi	3.973
14	Investasi	Mencatat investasi sebesar biaya perolehan	4.135
15	Aset Tetap	Klasifikasi Aset Tetap berdasarkan operasi entitas	4.135
16		Mencatat aset tetap sebesar biaya perolehan	4.297
17	Akuntansi	Pengungkapan Kontruksi dalam pengerjaan pada akhir periode	3.973
18	Kontruksi dalam Pengerjaan	Memindahkan konstruksi dalam pengerjaan asset jika konstruksi telah selesai	3.946
19	Akuntansi	Mengakui Kewajiban pada saat dana pinjaman diterima	4.378
20	Kewajiban	Mencatat kewajiban sesuai dengan nilai nominal	4.378
21	Koreksi	Koreksi kesalahan yang ditemukan	4.432
22	Kesalahan	Tindakan pembetulan pos pos tersaji sesuai seharusnya	4.324
23	Laporan Keuangan	Menyajikan laporan keuangan konsolidasi	4.054
24	Konsolidasi	Mencangkup semua laporan keuangan dari semua entitas	4.108
25	Laporan Operasional	Menyusun laporan operasional pada periode akuntansi	4.405
26		Mencangkup Pendapatan, beban, transfer, dan pos - pos	4.216
27	Penyajian Laporan	Laporan keuangan berbasis akrual.	4.270
28	Keuangan Badan Layanan Umum	Menerapkan pola pengelolaan keuangan diberikan fleksibilitas	4.189
Jumlah			117.779
Rata-rata			4.206

Sumber: Data Primer diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa standar akuntansi pemerintah yang terdiri dari 13 dimensi penelitian dengan nilai rata-rata dimensi terendah pada dimensi laporan realisasi anggaran pada indikator pengeluaran kas diakui belanja yaitu sebesar 3.919, hal ini berarti laporan realisasi anggaran dari beberapa lembaga sertifikasi kompetensi teknis akuntansi masih dianggap rendah rendah itu dikarenakan adanya kurang pemahaman lembaga terhadap laporan realisasi anggaran seperti TUK Santa Maria, TUK LPP Universal Skill dan LKP LPPI Cepu pada indikator Pengeluaran Kas diakui belanja, nilai rata-rata tertinggi pada dimensi penyajian laporan keuangan yaitu sebesar 4.541 prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan artinya lembaga merasa memahami prinsip – prinsip akuntansi yang mampu menghasilkan laporan keuangan menghasilkan kualitas yang baik, dikarenakan terdapat banyaknya lembaga yang memahami pada indikator Prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan seperti LPKMA Sumedang, YAI, LPBM Pembina, SWK Komputer, dll.

2. Deskripsi Variabel Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah penerapan sistem informasi akuntansi tersebut oleh masing-masing lembaga dalam penyusunan laporan keuangan. Terdapat 5 (lima) unsur-unsur sistem informasi akuntansi yang dapat dijadikan dimensi dalam penelitian ini yaitu prosedur, pencatatan, formulir, peralatan dan manusia, yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Deskripsi Variabel
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

No.	Dimensi	Indikator	Rata-Rata
1	Prosedur	Memahami prosedur sistem informasi akuntansi	3.838
2		Prosedur dan Sistem telah ditetapkan	3.919
3	Pencatatan	Kegiatan transaksi dicatat oleh fungsi akuntansi	3.865
4		Mencatat setiap transaksi terjadi	3.703
5	Formulir	Nomor urut yang digunakan	3.892
6		Formulir transaksi yang digunakan tercantum nomor urut tercetak	3.730
7	Peralatan	Alat-alat yang efektif	3.892
8		Alat-alat yang efisien	3.865
9	Manusia	Pelatihan tenaga kerja	3.919
10		Pengarahan tenaga kerja	3.784
Jumlah			38.407
Rata-rata			3.840

Sumber: Data Primer diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa penerapan sistem informasi akuntansi terdiri dari 5 dimensi penelitian dengan nilai rata-rata dimensi terendah pada dimensi pencatatan yaitu sebesar 3,703 artinya lembaga belum mampu mencatat setiap transaksi yang terjadi ini dikarenakan beberapa lembaga banyak mengalami kesulitan dalam mencatat transaksi seperti Lembaga Harapan Bangsa, LKP Eltibiz, dsb. Sedangkan nilai rata-rata tertinggi pada dimensi prosedur dan dimensi manusia dan dimensi pelatihan kerja yaitu sebesar 3.919 yang artinya lembaga memiliki prosedur dan sistem yang telah ditetapkan serta

adanya aktivitas pelatihan tenaga kerja dilakukan secara terus-menerus ini dikarenakan banyaknya lembaga akuntansi sudah memiliki prosedur dan sistem yang sudah diterapkan seperti UPT SMK Negeri 1 Grati, SMKN 1 Probolinggo, Kresna Informatika, dsb.

3. Deskripsi Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Ada tiga dimensi kompetensi sumber daya manusia yaitu: pengetahuan, *skill* dan perilaku, yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Deskripsi Variabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia

No.	Dimensi	Indikator	Rata-Rata
1	Pengetahuan	Mengetahui tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, dan siklus akuntansi	4.405
2		Memahami tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, dan siklus akuntansi	3.730
3	Skill atau Kemampuan	Menyusun tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, dan siklus akuntansi	4.541
4		Menyajikan tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, dan siklus akuntansi	3.811
5	Perilaku	Kontrol terhadap SDM setelah pelatihan	3.838
6		Kontrol terhadap SDM setelah	4.514

	pengarahan	
	Jumlah	24.480
	Rata-rata	4.140

Sumber: Data Primer diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa kompetensi sumber daya manusia terdiri dari 3 dimensi, dimensi pengetahuan dengan nilai rata-rata terendah pada indikator Memahami PP No. 71 Tahun 2010 yaitu sebesar 3.730 artinya dalam pemahaman dalam memahami PP No. 71 Tahun 2010 belum memahami oleh pihak lembaga terkait. Pada dimensi perilaku dengan indikator kontrol terhadap SDM setelah pengarahan memiliki nilai rata rata tertinggi sebesar 4.514. Maksudnya adalah masih terdapat lembaga yang belum mampu memahami pemahaman PP No. 71 Tahun 2010 namun kontrol terhadap sumber daya manusia setelah adanya pengarahan dan pelatihan terus dilakukan dengan baik.

4. Deskripsi Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan nilai dari hasil laporan keuangan yang mencakup unsur-unsur yaitu Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami. Variabel ini diukur dengan 4 dimensi dan 9 indikator yang bersifat reflektif, yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Deskripsi Variabel
Kualitas Laporan Keuangan

No.	Dimensi	Indikator	Rata-Rata
1	Tingkat Relevansi	Mengoreksi keputusan masa lalu (<i>Feedback Value</i>)	4.405
2		Tersusun dengan tepat waktu	4.270

3		Tersusun lengkap semua informasi	4.378
4	Tingkat Keandalan	Informasi di sajikan dengan jujur	4.459
5		Dapat Diverifikasi kebenarannya	4.541
6		LK Netralitas dan memenuhi kebutuhan	4.486
7	Tingkat Keterbandingan	Dapat di bandingkan Dengan Periode Sebelumnya	4.405
8	Tingkat Keterpahaman	Pemahaman para pengguna	4.405
9		LK disusun sistematis	4.514
Jumlah			39.863
Rata-rata			4.430

Sumber: Data Primer diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa kualitas laporan keuangan terdiri dari 4 dimensi penelitian dengan nilai rata-rata dimensi terendah pada indikator tersusun dengan tepat waktu yaitu sebesar 4,270 artinya lembaga sertifikasi kompetensi teknisi akuntansi, masih belum tersusun dengan tepat waktu dikarenakan adanya beberapa lembaga yang masih belum mampu menyusun laporan dengan tepat waktu seperti LKP Gemini, LPK Nur Fikri SMK PGRI Pedan, dsb. Nilai rata-rata tertinggi pada dimensi tingkat andal yaitu indikator dapat diverifikasi kebenarannya sebesar 4.541 artinya lembaga dalam menyajikan laporan keuangan dengan tingkat keandalannya laporan keuangan dapat di verivikasi kebenaran maupun keasliannya ini dikarenakan banyaknya lembaga yang mampu menyajikan laporan keuangan seperti LPBM Pembina, TLC Yayasan Administrasi Indonesia, SMK Bina Budi, dsb.

5. Deskripsi Variabel Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program dan Akuntabilitas kebijakan, yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6
Deskripsi Variabel
Akuntabilitas Publik

No.	Dimensi	Indikator	Rata-Rata
1	Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum	Struktur Organisasi	4.108
2		Kepatuhan terhadap hukum	4.324
3	Akuntabilitas Proses	Sistem informasi akuntansi kecukupan	4.351
4		Pengawasan terhadap pelaksanaan	4.270
5		Pemeriksaan Pengawasan terhadap pelaksanaan	4.378
6	Akuntabilitas Program	Tujuan yang di tetapkan	4.378
7		Manfaat dan dampak yang diberikan	4.459
8	Akuntabilitas Kebijakan	Kebijakan laporan setiap kegiatan	4.324
9		Pertanggung jawaban setiap kegiatan	4.270
Jumlah			38.862
Rata-rata			4318

Sumber: Data Primer diolah 2020

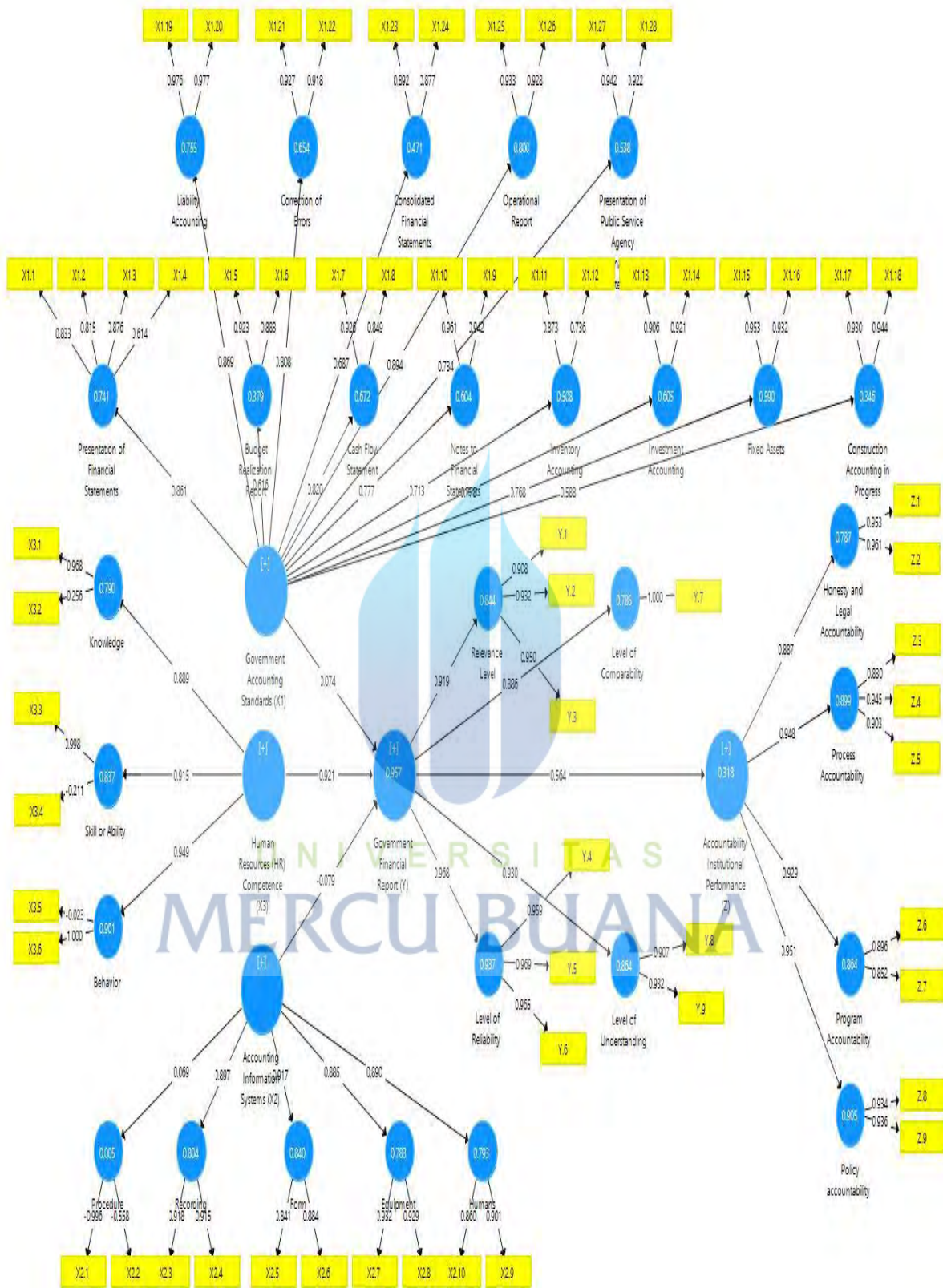
Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa akuntabilitas publik terdiri dari 4 dimensi penelitian dengan nilai rata-rata dimensi terendah pada indikator struktur organisasi yaitu sebesar 4.108 artinya masih kurangnya keterkaitan sturuktur organisasi dalam penggunaan

jabatan dalam membuat permohonan dan penggunaan dana yang diberikan, laporan tahunan dan pertanggungjawaban mengenai penggunaan dana seperti di lembaga YAI, LPK Pionir (SMKN 2 Kediri), Widya Wiyata (SMKN 1 Ponorogo. Nilai rata-rata tertinggi pada dimensi Akuntabilitas Program yaitu sebesar 4.459 pada indikator manfaat dan dampak yang diberikan yang artinya adanya kejelasan suatu program harus dapat memberikan manfaat dan dampak yang diberikan ini dikarenakan banyaknya lembaga sudah memanfaatkan dan memberikan dampak pada suatu program seperti di lembaga LPK Karisma, SMKN 1 Malang, dsb.

6. Uji Kualitas Data

6.1 Uji Validitas

Berikut ini adalah hasil *output factor loading* kongsruk standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas publik pada Smart PLS sebagai berikut:



Gambar 4.1
Output Loading Penelitian

Berdasarkan output pada diagram jalur di atas, *factor loading* untuk *second order* belum memenuhi *convergent validity* yaitu nilai indikatornya harus di atas 0,5. Masih ada *loading factor* dari beberapa indikator yang nilainya dibawah 0,5, sehingga nilai *loading factor* yang tidak memenuhi *convergent validity* tersebut harus dibuang (didrop). Selain gambar di atas, ditampilkan juga tabel uji validitas yang mendeskripsikan *loading factor* untuk masing-masing indikator sebagai berikut:

Tabel 4.7
Uji Validitas

Konstruk	Dimensi	Indikator	<i>Outer Loading</i>	Keterangan
Standard Akuntansi Pemerintah	X1.1	X1. 1	0.656	Valid
		X1. 2	0.656	Valid
		X1. 3	0.758	Valid
		X1. 4	0.634	Valid
	X1.2	X1. 5	0.607	Valid
		X1. 6	0.497	Tidak Valid
	X1.3	X1. 7	0.832	Valid
		X1. 8	0.594	Valid
	X1.4	X1. 9	0.663	Valid
		X1. 10	0.803	Valid
	X1.5	X1. 11	0.659	Valid
		X1. 12	0.475	Tidak Valid
	X1.6	X1. 13	0.680	Valid
		X1. 14	0.739	Valid
	X1.7	X1. 15	0.784	Valid
		X1. 16	0.654	Valid
	X1.8	X1. 17	0.520	Valid
		X1. 18	0.579	Valid
	X1.9	X1. 19	0.839	Valid
		X1. 20	0.858	Valid
	X1.10	X1. 21	0.764	Valid
		X1. 22	0.727	Valid
	X1.11	X1. 23	0.626	Valid
		X1. 24	0.588	Valid
	X1.12	X1. 25	0.848	Valid
		X1. 26	0.815	Valid

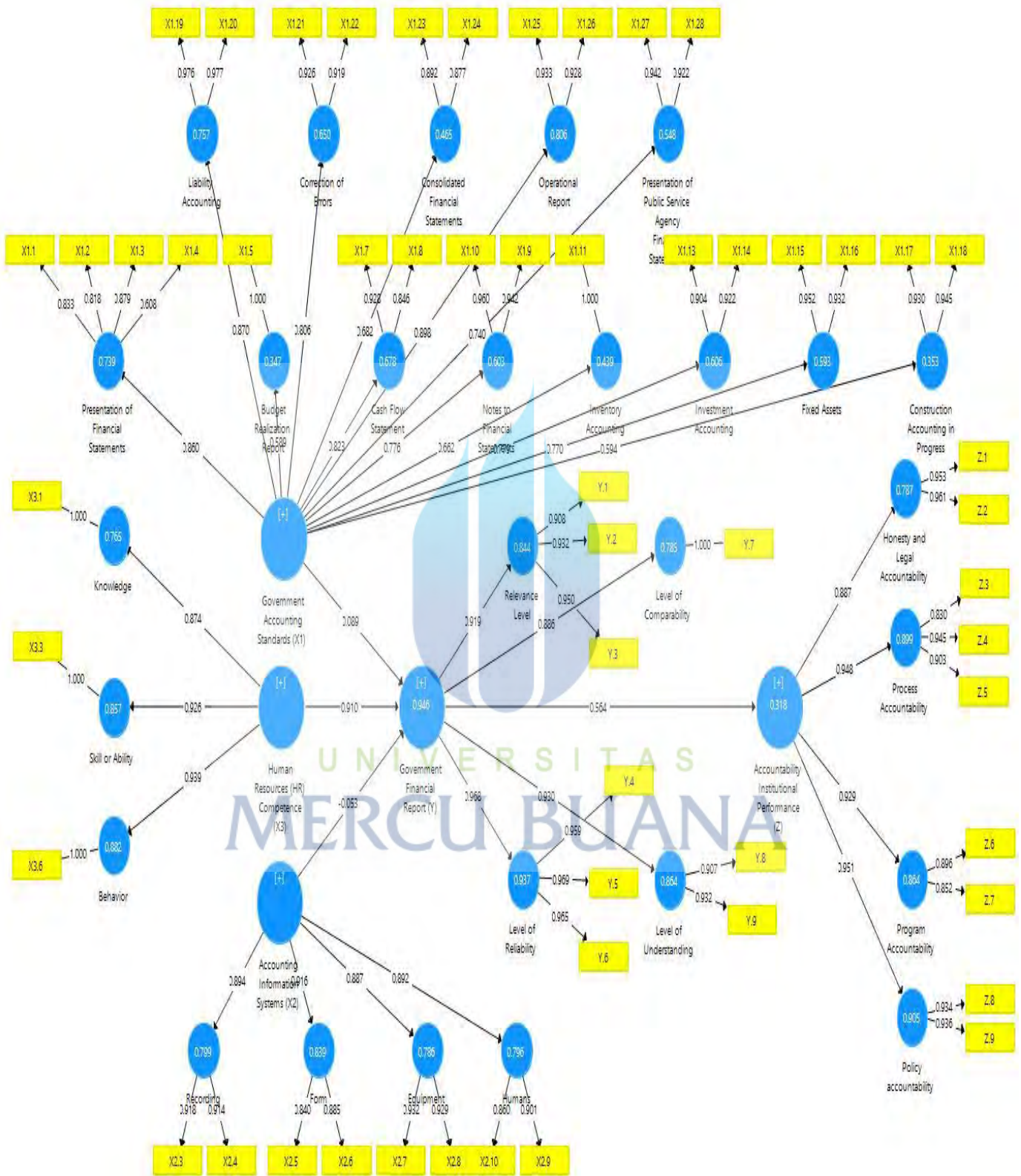
	X1.13	X1. 27	0.728	Valid
		X1. 28	0.635	Valid
Sistem Informasi akuntansi (X2)	X2.1	X2. 1	-0.064	Tidak Valid
		X2. 2	0.007	Tidak Valid
	X2.2	X2. 3	0.828	Valid
		X2. 4	0.814	Valid
	X2.3	X2. 5	0.729	Valid
		X2. 6	0.846	Valid
	X2.4	X2. 7	0.832	Valid
		X2. 8	0.814	Valid
X2.5	X2. 9	0.843	Valid	
	X2. 10	0.717	Valid	
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)	X3.1	X3. 1	0.861	Valid
		X3. 2	0.225	Tidak Valid
	X3.2	X3. 3	0.921	Valid
		X3. 4	-0.052	Tidak Valid
	X3.3	X3. 5	-0.028	Tidak Valid
X3. 6		0.949	Valid	
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Y.1	Y. 1	0.802	Valid
		Y. 2	0.837	Valid
		Y. 3	0.918	Valid
	Y.2	Y. 4	0.946	Valid
		Y. 5	0.934	Valid
		Y. 6	0.920	Valid
	Y.3	Y. 7	0.886	Valid
	Y.4	Y. 8	0.786	Valid
Y. 9		0.916	Valid	
Akuntabilitas Publik (Z)	Z.1	Z.1	0.807	Valid
		Z.2	0.887	Valid
	Z.2	Z.3	0.817	Valid
		Z.4	0.870	Valid
		Z.5	0.855	Valid
	Z.3	Z.6	0.875	Valid
		Z.7	0.742	Valid
Z.4	Z.8	0.884	Valid	
	Z.9	0.895	Valid	

Sumber : Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, *factor loading* untuk *second order* yang belum memenuhi *convergent validity* tersebut harus dibuang (didrop). Berikut ini adalah hasil *output factor loading* kongsruk standar

akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja lembaga pada Smart PLS setelah di drop sebagai berikut:





Gambar 4.2
Output Loading Penelitian Setelah Drop

Berdasarkan *output* pada diagram jalur di atas, setelah dilakukan drop nilai *factor loading* untuk *second order* sudah memenuhi *convergent validity* yaitu nilai indikator sudah di atas 0,5. Selain gambar di atas, ditampilkan juga tabel uji validitas yang mendeskripsikan *loading factor* untuk masing-masing indikator sebagai berikut:

Tabel 4.8
Uji Validitas

Konstruk	Dimensi	Indikator	<i>Outer Loading</i>	Keterangan
Standard Akuntansi Pemerintah	X1.1	X1. 1	0.657	Valid
		X1. 2	0.663	Valid
		X1. 3	0.764	Valid
		X1. 4	0.618	Valid
	X1.2	X1. 5	0.589	Valid
	X1.3	X1. 7	0.841	Valid
		X1. 8	0.587	Valid
	X1.4	X1. 9	0.664	Valid
		X1. 10	0.801	Valid
	X1.5	X1. 11	0.662	Valid
	X1.6	X1. 13	0.674	Valid
		X1. 14	0.745	Valid
	X1.7	X1. 15	0.783	Valid
		X1. 16	0.659	Valid
	X1.8	X1. 17	0.523	Valid
		X1. 18	0.587	Valid
	X1.9	X1. 19	0.839	Valid
		X1. 20	0.860	Valid
	X1.10	X1. 21	0.761	Valid
		X1. 22	0.76	Valid
	X1.11	X1. 23	0.621	Valid
		X1. 24	0.584	Valid
	X1.12	X1. 25	0.848	Valid
		X1. 26	0.822	Valid
	X1.13	X1. 27	0.738	Valid
		X1. 28	0.636	Valid
X2.2	X2. 3	0.826	Valid	
	X2. 4	0.811	Valid	

	X2.3	X2. 5	0.727	Valid
		X2. 6	0.847	Valid
	X2.4	X2. 7	0.833	Valid
		X2. 8	0.817	Valid
	X2.5	X2. 9	0.846	Valid
X2. 10		0.717	Valid	
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)	X3.1	X3. 1	0.874	Valid
	X3.2	X3. 3	0.926	Valid
	X3.3	X3. 6	0.939	Valid
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Y.1	Y. 1	0.802	Valid
		Y. 2	0.837	Valid
		Y. 3	0.918	Valid
	Y.2	Y. 4	0.946	Valid
		Y. 5	0.934	Valid
		Y. 6	0.920	Valid
	Y.3	Y. 7	0.886	Valid
	Y.4	Y. 8	0.786	Valid
Y. 9		0.916	Valid	
Akuntabilitas Publik (Z)	Z.1	Z.1	0.807	Valid
		Z.2	0.887	Valid
	Z.2	Z.3	0.817	Valid
		Z.4	0.870	Valid
		Z.5	0.855	Valid
	Z.3	Z.6	0.875	Valid
		Z.7	0.742	Valid
	Z.4	Z.8	0.884	Valid
		Z.9	0.895	Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2020

6.2 Uji Reliabilitas

Hasil pengujian reliabilitas pada variabel laten standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas publik sebagai berikut:

Tabel 4.9
Uji Reliabilitas

Variabel & Dimensi	AVE	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintah (X ₁)	0,502	0,959	0,963	Reliabel
Sistem Informasi Akuntansi (X ₂)	0,647	0,921	0,936	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₃)	0,835	0,900	0,938	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,782	0,965	0,970	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja Lembaga (Z)	0,721	0,951	0,959	Reliabel

Sumber : Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil *output* reliabilitas di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk semua dimensi dalam variabel standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja lembaga memiliki *Cronbach's Alpha* di atas 0,6 dan *Composite Reliability* di atas 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan pada masing-masing dimensi mempunyai reliabilitas yang sangat baik atau mampu untuk mengukur konstraknya.

6.3 Evaluasi *Goodness Of Fit* Model Struktural (*Inner Model*)

Evaluasi *Goodness Of Fit* Model Struktural diukur dengan menggunakan nilai *predictive-relevance* (Q^2). Nilai *predictive-relevance* (Q^2) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Q^2 = 1 - (1 - R1^2) (1-R2^2) \dots n$$

$$Q^2 = 1 - (1 - 0.946) (1-0.318)$$

$$Q^2 = 1 - (0,054) (0,682)$$

$$Q^2 = 1 - 0,0368$$

$$Q^2 = 0,963$$

R^2 adalah koefisien determinasi yang merupakan bagian dari variasi total dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variasi dalam variabel independen. Tabel 4.10 berikut menjelaskan hasil analisis koefisien determinasi dari variabel-variabel penelitian:

Tabel 4.10
R Square

Variabel	<i>R Square</i>
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0.946
Akuntabilitas Publik (Z)	0.318
<i>Predictive-Relevance</i> (Q^2)	0,963

Sumber : Data Primer diolah, 2020

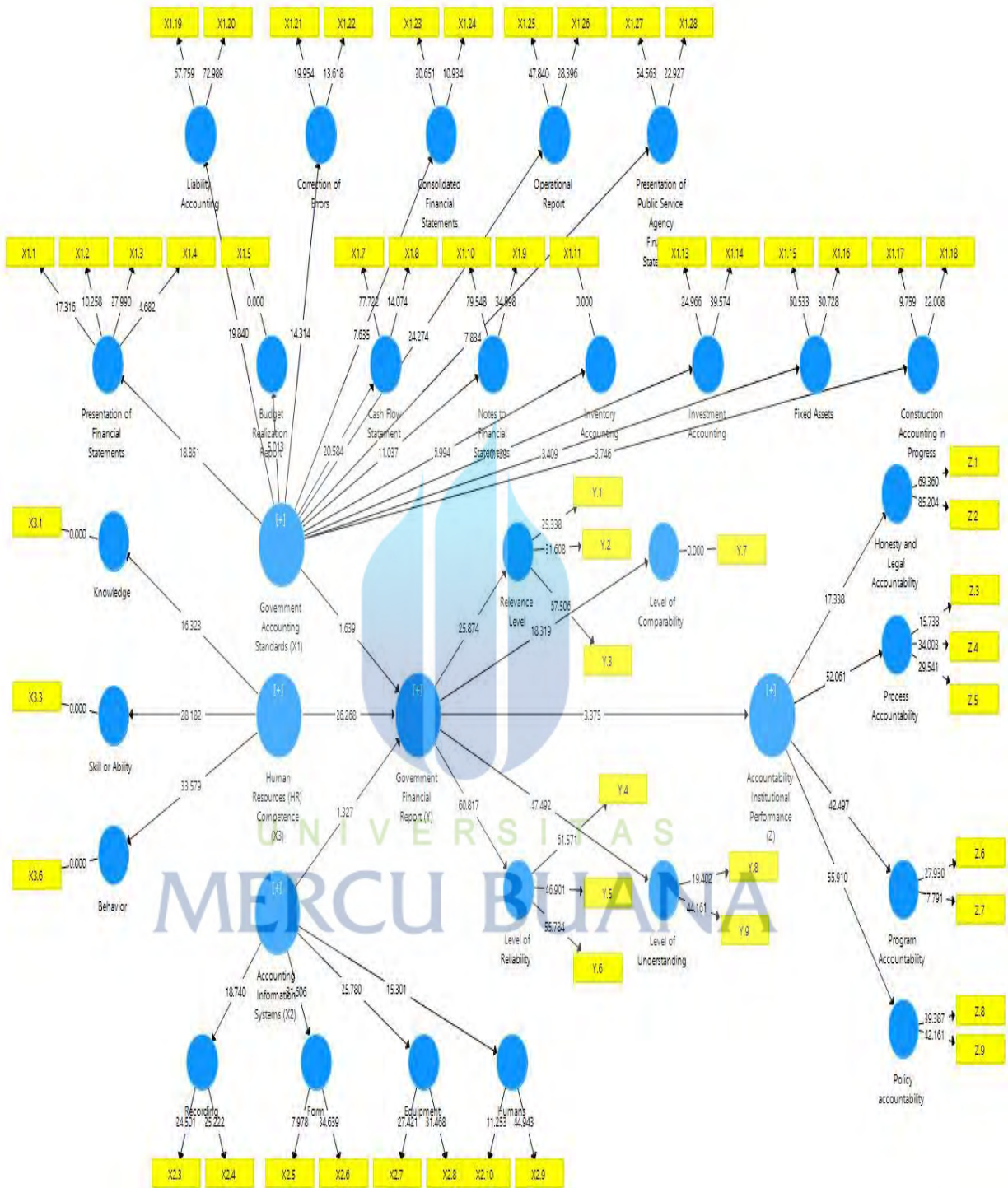
Berdasarkan koefisien determinasi pada tabel di atas, diperoleh nilai R^2 untuk variabel kualitas laporan keuangan sebesar 0,946 yang

artinya nilai tersebut mengindikasikan bahwa variabel kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel standar akuntansi pemerintah, variabel sistem informasi akuntansi dan variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 94% sedangkan sisanya yaitu sebesar 6% dipengaruhi variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian. Nilai R^2 untuk variabel akuntabilitas publik sebesar 0,318 yang artinya bahwa variabel akuntabilitas publik dijelaskan oleh standar akuntansi pemerintah, variabel sistem informasi akuntansi dan variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 32% sedangkan sisanya yaitu sebesar 68% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian.

Evaluasi *inner model* tersebut sangat baik dalam menjelaskan variabel kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas publik. sedangkan nilai *predictive-relevance* untuk model struktural dalam penelitian ini adalah sebesar 0,963 atau 96,3% artinya model mampu menjelaskan fenomena akuntabilitas publik dikaitkan dengan beberapa variabel yaitu, kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, model dapat dikatakan baik, atau model memiliki nilai prediktif yang baik, pada akhirnya model dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

C. Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis, adalah sebagai berikut:



Gambar 4.3
Diagram Jalur Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi $T_{\text{statistik}}$ dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11
Path Coefficients

Hubungan Antar Variabel	Koefisien Parameter	T Statistik	P Values	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintah -> Kualitas Laporan Keuangan	0,055	1.639	0,102	Tidak Signifikan

Sumber : Hasil pengolahan data smart PLS

Berdasarkan tabel 4.11 besarnya koefisien parameter yang diperoleh dari pengaruh variabel standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar 0,055 dengan nilai $T_{\text{statistik}}$ $1.639 < 2,042$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ (5%) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tidak mendukung hipotesis yang pertama (H_{a1}), dimana tidak terdapat pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi $T_{\text{statistik}}$ dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut:

Tabel 4.12
Path Coefficients

Hubungan Antar Variabel	Koefisien Parameter	T Statistik	P Values	Keterangan
Sistem Informasi Akuntansi -> Kualitas Laporan Keuangan	0,040	1.327	0.185	Tidak Signifikan

Sumber : Hasil pengolahan data smart PLS

Berdasarkan tabel 4.12 besarnya koefisien parameter yang diperoleh dari pengaruh variabel penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar 0,040 dengan nilai $T_{\text{statistik}}$ $1.327 < 2,042$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ (5%) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. nilai 0,040 pada koefisien parameter artinya semakin kecil penerapan sistem informasi akuntansi maka semakin kecil pula kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis penelitian kedua (H_{a2}), bahwa tidak terdapat pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi $T_{\text{statistik}}$ dapat dilihat pada tabel 4.13 sebagai berikut:

Tabel 4.13
Path Coefficients

Hubungan Antar Variabel	Koefisien Parameter	T Statistik	P Values	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia -> Kualitas Laporan Keuangan	0.035	26.268	0,000	Signifikan

Sumber : Hasil pengolahan data smart PLS

Berdasarkan tabel 4.13 besarnya koefisien parameter yang diperoleh dari pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar 0.035 dengan nilai $T_{\text{statistik}}$ 26.268 > 2.042 pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ (5%) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai 0.035 pada koefisien parameter artinya semakin baik kompetensi sumber daya manusia yang dihasilkan maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis penelitian ketiga (H_{a3}), bahwa terdapat pengaruh signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

4. Dampak Kualitas Laporan Keuangan Pada Akuntabilitas Kinerja Lembaga

Nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi $T_{\text{statistik}}$ dapat dilihat pada tabel 4.14 sebagai berikut:

Tabel 4.14
Path Coefficients

Hubungan Antar Variabel	Koefisien Parameter	T Statistik	P Values	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan -> Akuntabilitas Publik	0,167	3.375	0,001	Signifikan

Sumber : Hasil pengolahan data smart PLS

Berdasarkan tabel 4.14 besarnya koefisien parameter yang diperoleh dari dampak variabel kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik adalah sebesar 0,167 dengan nilai $T_{\text{statistik}} 3.375 > 2,040$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ (5%) yang menyatakan bahwa terdapat dampak positif signifikan kualitas laporan keuangan pada akuntabilitas publik. Nilai 0,167 pada koefisien parameter artinya semakin baik kualitas laporan keuangan maka semakin baik pula dampak akuntabilitas publik. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis penelitian keempat (H_{a4}), bahwa terdapat dampak kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Standard Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah diartikan sebagai suatu pemahaman yang digunakan untuk pengantar standar akuntansi pemerintahan dan disusun mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Hasil ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pemahaman akuntansi belum menjamin maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi standar akuntansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Berbasis Akrua, yang kemudian diperbaharui dengan keluarnya Permendagri No 64 Tahun 2013 yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Berbasis Akrua, maka dalam menghasilkan laporan diperlukan pengelolaan keuangan yang baik. Lembaga harus memiliki kapasitas sumber daya yang berkompeten dan mempunyai pemahaman akuntansi yang didukung dengan latar belakang pendidikan dibidang akuntansi dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan.

Upaya menghasilkan dan menyusun laporan keuangan pemerintah, seorang penyusun laporan keuangan harus memahami Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan lembaga. Secara konseptual jika seorang individu haruslah memahami standar akuntansi pemerintah sebagai penyusun untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Begitu pula sebaliknya jika seorang individu tidak memahami standar akuntansi pemerintah sebagai dasar penyusunnya maka kompetensinya sebagai penyusun tidak akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil statistik menunjukkan tidak berpengaruh signifikan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan kemungkinan disebabkan oleh tidak memahaminya penyusun standar akuntansi pemerintah antara laporan keuangan pemerintah pusat dengan laporan keuangan lembaga. Sehingga, pemahaman tentang standar akuntansi pemerintah yang disusun memiliki perbedaan antara apa yang telah disusun dengan tim penyusun laporan lembaga dengan kesesuaian lembaga sertifikasi kompetensi bond'09, sehingga sering terjadi pengembalian laporan keuangan karena tidak memenuhi standar kesesuaian laporan keuangan lembaga pusat. Temuan ini juga memperkuat berdasarkan hasil survey dan wawancara di lokasi banyak temuan yang menggambarkan bahwa banyaknya lembaga lebih memilih membentuk tim untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan jasa konsultan. Sehingga pemahaman tentang standar akuntansi pemerintah yang tersusun masih belum maksimal dalam penyusunannya dan meskipun umumnya kompetensi pengurus lembaga berstatus berpendidikan namun

dibutuhkan adanya pelatihan atau workshop mengenai penyusunan laporan standard akuntansi pemerintah. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan seperti Armel (2017), Pengaruh Pemahaman SAP menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian pula Mahaputra dan Putra (2014), Hasil analisis diperoleh pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian M. Ali Fikri Biana Adha Inapty dan RR Sri Pancawati Martiningsih (2016) yang memperoleh hasil bahwa standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada (Satuan Kerja Perangkat Daerah) SKPD Pemerintah Pemrov NTB.

2. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penerapan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi penerapan sistem informasi akuntansi dalam suatu instansi belum mampu menjamin kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Sistem informasi akuntansi lembaga merupakan kebijakan dan prosedur

yang dirancang untuk memberikan kenyamanan dan fasilitas yang memadai dan mendukung bagi pihak manajemen bahwa aktivitas suatu program berjalan secara efektifitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan kualitas laporan keuangan. Sistem informasi akuntansi lembaga merupakan suatu langkah nyata bahwa lembaga dalam memberikan suatu prosedur sebagai suatu pijakan bagi lembaga itu sendiri agar aktivitas dari suatu program dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya *miss* komunikasi dari perorangan maupun sistem yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut. Sistem informasi akuntansi yang baik dalam suatu lembaga dapat menjadi jaminan bagi instansi lembaga tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menghasilkan aktivitas atau program berjalan dengan lancar dan baik sesuai yang telah ditetapkan oleh lembaga.

Hasil statistik menunjukkan tidak berpengaruh signifikan sistem informasi akuntansi disebabkan belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi akuntansi guna menunjang pembuatan laporan keuangan. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi akuntansi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan keahlian dalam menggunakan teknologi dan komputerisasi yang semakin kompleks, sehingga dalam penginputan dalam komputerisasi masih kurang efektif dalam penggunaannya, serta di tinjau beberapa lembaga yang disurvei masih menggunakan pembukuan manual dalam menyusun laporan keuangan. Meskipun lembaga sudah di fasilitasi peralatan dan sistem oleh lembaga kompetensi teknisi akuntansi

bond 09, namun hal tersebut menjadikan sistem yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan yang diinginkan, sistem informasi masih mengalami kendala dan tampak masih asing bagi penggunanya, sehingga penguasaannya menjadi kurang efektif dan efisien dan kurang dapat mendukung penyajian laporan keuangan yang handal. Hal ini berarti jika implementasi untuk menyusun laporan keuangan tidak didukung oleh penerapan sistem informasi yang baik, maka akan terjadi ketidakefektifan dan ketidakefisienan di dalam penyusunan pelaporan keuangan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa lembaga belum mampu menerapkan sistem informasi akuntansi secara efektif dan efisien, sehingga membuat penerapan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi yang telah diterapkan tidak berjalan dengan baik sehingga mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Diani (2013), yang menyatakan penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD kota Pariaman. Hal berbeda didapatkan dari penelitian Tambingon, Henny N. dkk (2018) yang menyatakan *bahwa The results showed that Furthermore it was found that the quality of accounting information system has implications for the quality of financial reporting.* Didukung oleh penelitian Mahaputra dan Putra (2014) yang menyatakan Hasil analisis diperoleh pemahaman sistem informasi

keuangan berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar.

3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan semakin tinggi tingkat kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kompetensi sumber daya manusia sebagai karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Dengan adanya penjelasan mengenai kompetensi dan sumber daya manusia diatas kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan lembaga, namun penelitian ini berhasil membuktikan pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu penyampaian informasi dalam laporan keuangan maka dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Mengevaluasi kompetensi yang dimiliki seseorang, kita akan dapat memprediksikan kinerja orang tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan atau kompetensi sumber daya manusia untuk menciptakan kinerja karyawan yang baik dan dapat berdampak positif bagi suatu perusahaan dan juga dapat meningkatkan kompetensi personal yang terlibat didalamnya. Hasil statistik menunjukkan bahwa

kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, hal ini menunjukkan bahwa pengurus maupun penanggung jawab lembaga memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan paham dan bisa menyelesaikan permasalahan dalam menyusun laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan penanggung jawab di tuntut untuk dapat memahami penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan sistem dan prosedur yang telah di tetapkan, sehingga sangat memperhatikan betul latar belakang pendidikan penanggung jawab lembaga. Terlebih lagi bidang pendidikan para lembaga juga tidak mengalami hambatan dalam meyelesaikan masalah penyusunan laporan keuangan. Dari hasil survey dan wawancara sumber daya manusia di bagian akuntansi keuangan diakui sangat banyak dari karyawan dalam lembaga memiliki kualifikasinya. Kualifikasi yang dimaksud adalah sebagian besar pengelola lembaga keuangan memiliki latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi. Serta adanya pelatihan pelatihan dan aktivitas dari lembaga yang berkaitan dengan fungsi dan akuntansi keuangan terus dilakukan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian akuntanasi dalam tugas yang dilakukan. Kompetensi akuntansi merupakan salah satu factor terpenting dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Walaupun sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah sudah memadai jika tidak di dukung dengan adanya kompetensi dan skill khusus dari penanggung jawab yag kompeten maka semua itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Maka dari

itu sangat penting sekali adanya kompetensi dari staf akuntansi dalam menyusun dan melaporkan laporan keuangan pemerintah yang nantinya pemerintah tidak perlu khawatir lagi mengenai kualitas keuangan pemerintah lembaga. Hal ini lah yang menjadi penyebab mengapa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan lembaga. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hari Setiyawati , Diah Iskandarnuru dan Yusuf S. Basar (2015) yang menyatakan *The Internal Accountants' Competence has signification effects on the Quality of Financial Reporting, Financial Reporting Quality significant effect on the Financial Accountability*. Sejalan dengan penelitian Dyah Puri Surastiani (2015) yang menyatakan bahwa Kompetensi SDM secara bersama-sama yang berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD.

4. Dampak Kualitas Laporan Keuangan Pada Akuntabilitas Kinerja Lembaga

Kualitas laporan keuangan berdampak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja lembaga. Artinya semakin baik kualitas penyusunan pelaporan keuangan maka semakin baik dampaknya terhadap akuntabilitas kinerja lembaga. Penyajian dan penyusunan laporan keuangan yang baik akan memperjelas penyusunan pelaporan keuangan lembaga karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan lembaga,

sehingga pengelolaan keuangan lembaga tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja lembaga salah satunya dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan PP No.71 tahun 2010 laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan memenuhi unsur relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan lembaga juga dapat dikatakan berkualitas apabila menerapkan standar akuntansi pemerintah (SAP) dengan baik dan benar. Tujuan suatu laporan keuangan pemerintah adalah memberikan informasi yang akuntabel dan transparan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menunjukkan akuntabilitas suatu instansi pemerintah. Hasil statistik menunjukkan pengaruh signifikan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas lembaga disebabkan lembaga sudah mampu menggambarkan bagaimana laporan keuangan berkualitas tersebut sudah berjalan dan transparan dalam menyusun laporan keuangannya serta hasil dan evaluasi program dan aktivitas yang dilakukan serta evaluasi mampu dipertanggungjawabkan dan transparansi pelaporan dan penyusunan sudah berjalan dengan optimal meskipun masih ada lembaga yang masih terlambat dalam pelaporannya yang disebabkan adanya membutuhkan waktu yang cukup dalam evaluasi dan revisi dalam menyusun pelaporannya dari lembaga pusat itu sendiri. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa kualitas laporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah, laporan keuangan

berkualitas merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dan transparan dalam melaksanakan akuntabilitas, laporan keuangan bentuk salah satu mekanisme pertanggung jawaban sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bagi para yang membutuhkannya. Maka laporan keuangan lembaga perlu pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan. yang berkualitas merupakan Sejalan dengan penelitian Diah dan Hari (2015) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berdampak positif terhadap akuntabilitas publik. Didukung oleh penelitian Darwanis dan Chairunnisa (2013) yang menyatakan *The results showed that the application of the area of financial accounting, financial reporting quality control , and clarity of the budget targets simultaneously affect the performance accountability of government agencies in Aceh . The application areas of financial accounting effect on performance accountability Aceh government agencies. Oversight of financial reporting quality effect on performance accountability of government agencies in Aceh . Budget goal clarity does not affect the performance accountability of government agencies in Aceh.*

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya masih kurangnya sosialisasi pemahaman standar akuntansi pemerintah.
2. Sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya masih kurangnya pelatihan dalam penggunaan sistem informasi akuntansi yang dibutuhkan.
3. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
4. Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas publik. Artinya semakin baik kualitas laporan keuangan maka semakin baik dampak terhadap akuntabilitas kinerja lembaga.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran lebih khusus kepada lembaga sertifikasi kompetensi teknisi akuntansi bond'09 agar meningkatkan kualitas penerapan standar akuntansi pemerintah melalui pelatihan-pelatihan mengenai standar akuntansi pemerintah kepada lembaga semakin tinggi pemahaman standar akuntansi pemerintah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangannya, serta lembaga meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi nya melalui pelatihan dan workshop komputerisasi kepada lembaga semakin baik pemahaman sistem akuntansi nya maka semakin baik pula kualitas laporan keuangannya, lembaga agar terus meningkatkan kualitas kompetensi sumber daya manusia semakin baik kompetensi sumber daya manusia semakin baik pula kualitas laporan keuangan nya, lembaga agar terus meningkatkan kualitas laporan keuangannya melalui adanya pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pengetahuan dan pengawasan dalam menyusun laporan keuangan guna mencapai kualitas laporan yang handal semakin baik penyusunan laporan keuangan semakin baik pula akuntabilitas kinerja lembaganya, dan agar lembaga meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaganya melalui ketepatan waktu yang telah ditetapkan lembaga dalam menyelesaikan laporan keuangan agar terus ditingkatkan karena akan terus berpengaruh terhadap penilaian LSK terhadap masing-masing lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Afiah, N.N., dan Rahmatika, D.N. (2014). Factors Influencing The Quality Of Financial Reporting And Its Implications On Good Government Governance. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 5, Issue 1 (Dec.) ISSN 2289-1552 (2014).
- Al-Ibbini, Omran Ahmad Mohammad. (2017). The Critical Success Factors Influencing the Quality of Accounting Information Systems and the Expected Performance. *International Journal of Economics and Finance*. Vol. 9, issue 12, 162-167. ISSN 1916-971X . E-ISSN 1916-9728.
- Anisma, Hasan, Yensi. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi. *Jom FEKON* Vol. 1 No.2 Oktober 2014.
- Anggriawan, F.T. dan Yudianto, I. (2018). Factors Affecting Information Quality of Local Government Financial Statement. *Journal of Accounting Auditing and Business*. Vol.1 No.1, hal 30-42.
- Armel, Raja Yoga Gustika. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai). *Jom Fekon*, Vol.4 No.1.
- Azhar, Susanto. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi*. Lingga Jaya
- Azhar, Susanto. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi*. Lingga Jaya.
- Baridwan, Zaki. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi*. BPFE.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga.
- Bodnar, George H. and Hopwood, William S. (2014). *Accounting Information Systems*. Eleventh Edition. Pearson Education.
- Cuong, Nguyen Thanh. (2014). Threshold Of Capital Structure On Firm Value, Evidence Form Seafood Processing Enterprises In The South Region Of

Vietnam. *International Research Journal of Finance and Economics*. ISSN 1450-2887 Issue 160 March, 2017

- Darwanis dan Chairunnisa, Sephi. (2013). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Vol. 6, No. 2 Juli 2013 Hlm. 150-174. Universitas Syiah Kuala
- Diani, Dian Irma. (2013). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman). *E-Journal* Vol 2 No.1. Padang. Universitas Negeri Padang,
- Diptyana, Pepie dan Dewi, Nurul Hasanah Uswati. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi; Pendekatan Proses Bisnis*. Penerbit STIE Perbanas Surabaya.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16: 49-64.
- Dyah, Puri Surastiani. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam Jurnal Dinamika Akuntansi. *Jurnal Dinamika Akuntansi* Vol 7, No. 2 September 2015, PP 139-149 Issn 2085-4277
- Fajri, Sri Nurul. (2013). *Kualitas Pelaporan Keuangan: Berbagai Faktor Penentu dan Konsekuensi Ekonomi*. Salemba Empat.
- Fuad, Muhamad Indra Yudha Kusuma. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrua Pada Pemerintah. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013, Halaman 1 ISSN (Online):2337- 3806.
- Ghozali, Imam. (2014). *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Badan Penerbit
- Gondodiyoto, S. (2007). *Audit Sistem Informasi: Pendekatan Cobit. Edisi Revisi*. Mitra Wacana Media.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2015). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Rajawali Pers.
- Hari, Setiyawati, dkk. (2015). The Quality of Financial Reporting through Increasing the Competence of Internal Accountants and Accrual Basis. *International Journal of Economics, Business and Management Studies* Vol. 5, No. 1, 31-39, 2018 e-ISSN: 2226-4809/p-ISSN: 2304-6945.

- Hasan, A.Y. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian *Intern* (internal audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singing). *JOM FEKON* Vol.1 No. Oktober.
- Hery. (2017). *Kajian Riset Akuntansi. Mengulas Berbagai Hasil Penelitian Terkini Dalam Bidang Akuntansi Dan Keuangan*. Grasindo.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. IAI
- Ircham, Muhammad, dkk. (2014). Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas terhadap harga saham. *Jurnal Akuntansi Bisnis (JAB)*. Vol 11 No. 1.
- Irianto, Agus. (2004). *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Kencana.
- Isthika Wikan, Setyowati, dan Lilis. (2014). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Semarang. *Jurnal Proceedings SNEB. Kinerja*, Volume 20, No. 2, Th 2016. Hal 179-191
- Julita, Susilatri. (2018). Analysis Of Factor Affecting The Quality of Government Financial Report Bengkalis Regency. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 7(2), 157–164.
- Krismiaji. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Unit Penerbit.
- M.Ali Fikri Biana Adha Inapaty dan RR. Sri Pancawati Martiningsih. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *Akuntabilitas Jurnal Ilmu Akuntansi Volume* 9(1), April 2016 P-ISSN:1979-858X;E-ISSN:2461-1190, Page 27-42
- Mahaputra dan Putra. (2014). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol:8 No:2 Tahun 2014.
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Cetakan Pertama. Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Mardi. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi*. Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.

- Marshall B. Romney, dan Paul John Steinbart. (2015). *Accounting information system*. Edisi 13. Salemba Empat
- Martani, Dwi, dkk. (2014). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Salemba Empat
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat
- Megawati, dkk. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng). *e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*. (Volume 3 No. 1).
- Nugraeni dan M. Budiantara. (2015). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara*. Yogyakarta. Vol. 12, No.1
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Romney, Marshall B. dan Steinbart. (2015). *Accounting. Information System 13th ed*. England. Pearson Educational Limited.
- Samiaji, Sarosa. (2009). *Sistem Informasi Akuntansi*. Grasindo.
- Sari, dkk. (2014). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada dinas-dinas pemerintah di Kabupaten Jemberana). *e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol.2 No.1).
- Siti Chodijah dan Nurul Hidayah. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Tekun*. Vol 8. No. 1. Maret 2018.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta CV.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Pustaka Baru Press.

- Tambingon, Henny, N., Yadiati, Winwin. & Kewo, Cecilia, L. (2018). Determinant Factors Influencing the Quality of Financial Reporting Local Government in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*. Vol 8 Issue 2 2018, 262-268 ISSN: 2146-4138.
- Wati, Kadek Desiana., H., dan Sinarwati. K. (2014). Pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAP, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *E-Journal* Vol 2 No.1. Singaraja.
- Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja*. PT Rajagrafindo Persada.
- Yuliani, Safrida dkk. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* Vol 3.No.2 Hal. 206-20.



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN DAN DAMPAKNYA PADA AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA
(Survei Lembaga Sertifikasi Kompetensi Teknisi Akuntansi Bond'09)**

A. Identitas Responden

Untuk keperluan validitas jawaban kuesioner dan analisis data, kami memerlukan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai responden. Dimohon Bapak/Ibu berkenan mengisi identitas berikut atau memberi tanda *check list* (✓) pada kotak yang tersedia:

Nama	:	
Jenis Kelamin	:	Pria Wanita
Usia	:	Tahun
Jabatan	:	
Pendidikan Terakhir	:	SMA D3 S1 S2 S3
Nama Lembaga	:	
Alamat Lembaga	:	

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Cara pengisian kuesioner adalah :
 - a. Mohon bantuan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada dengan lengkap dan jujur.
 - b. Semua pertanyaan dijawab dengan cara memberikan tanda *check list* (✓) pada salah satu jawaban yang tersedia dan paling tepat menurut persepsi Bapak/Ibu.
2. Terdapat lima alternatif pengisian jawaban dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. Sangat Tidak Setuju (STS) : Skor 1
 - b. Tidak Setuju (TS) : Skor 2
 - c. Ragu-Ragu (RR) : Skor 3
 - d. Setuju (S) : Skor 4
 - e. Sangat Setuju (SS) : Skor 5

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH						
No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	RR	TS	STS
PSAP No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan						
1.	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.					
2.	Saya menerapkan basis akrual untuk mengakui aset					
3.	Saya menerapkan basis akrual untuk mengakui kewajiban					
4.	Saya menerapkan basis kas untuk mengakui pendapatan dan belanja					
PSAP No. 2 Tentang Laporan Laporan Realisasi Anggaran						
5.	Saya mencatat pendapatan sesuai dengan asas bruto					
6.	Saat ada pengeluaran dari rekening kas, lembaga ini mengakuinya sebagai belanja					
PSAP No. 3 Tentang Laporan Arus Kas						
7.	Saya menyusun laporan arus kas sesuai SAP yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi.					
8.	Saya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas operasi					
PSAP No. 4 Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan						
9.	Saya menyajikan catatan atas laporan keuangan pada setiap periode pelaporan					

10.	Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan					
PSAP No. 5 Tentang Akuntansi Persediaan						
11.	Saya mengakui persediaan pada saat diterima atau hak milik berpindah					
12.	Pencatatan persediaan dilakukan berdasarkan inventarisasi fisik					
PSAP No. 6 Tentang Akuntansi Investasi						
13.	Saya mengakui kas yang dikeluarkan sebagai investasi setelah memenuhi kriteria manfaat masa datang dapat diperoleh dan nilai investasi dapat diukur					
14.	Saya mencatat investasi sebesar biaya perolehan untuk kepemilikan permanen					
PSAP No. 7 Tentang Aset Tetap						
15.	Saya mengklasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas					
16.	Saya mencatat aset tetap sebesar biaya perolehan					
PSAP No. 8 Tentang Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan						
17.	Saya mengungkapkan informasi konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi					
18.	Saya memindahkan konstruksi dalam pengerjaan ke asset tetap jika pekerjaan konstruksi telah selesai					
PSAP No. 9 Tentang Akuntansi Kewajiban						
19.	Saya mengakui kewajiban pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul					

20.	Saya mencatat kewajiban sesuai dengan nilai nominal					
PSAP No. 10 Tentang Koreksi Kesalahan						
21.	Saya melakukan koreksi terhadap kesalahan yang ditemukan					
22.	Koreksi adalah tindakan pembetulan agar pos-pos yang tersaji sesuai dengan seharusnya.					
PSAP No. 11 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasi						
23.	Saya dapat menyajikan laporan keuangan konsolidasi					
24.	Laporan keuangan konsolidasi mencakup semua laporan keuangan dari semua entitas akuntansi					
PSAP No. 12 Tentang Laporan Operasional						
25.	Saya menyusun laporan operasional pada periode akuntansi					
26.	Laporan operasional mencakup pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa					
PSAP No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum						
27.	Saya menerapkan pelaporan menyusun laporan keuangan berbasis akrual					
28.	Saya menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU yang diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan					

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 SAP

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI						
No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	RR	TS	STS
Tentang Prosedur						
1.	Saya memahami prosedur sistem informasi akuntansi					
2.	Saya telah menerapkan prosedur dan sistem informasi akuntansi yang telah ditetapkan					
Tentang Pencatatan						
1.	Seluruh kegiatan transaksi dicatat oleh fungsi akuntansi					
2.	Setiap transaksi yang dicatat dan selalu didukung dengan bukti-bukti transaksi					
Tentang Formulir						
1.	Pada setiap formulir transaksi yang digunakan tercantum nomor urut yang digunakan					
2.	Pada setiap formulir transaksi yang digunakan tercantum nomor urut tercetak untuk mengawasi pemakaiannya dan mengidentifikasinya					
Tentang Peralatan						
1.	Alat-alat yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi dapat dikatakan efektif dalam melindungi asset lembaga					
2.	Alat-alat yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi dapat dikatakan efisien dalam melindungi asset perusahaan					
Tentang Manusia						
1.	Pelatihan yang diberikan lembaga relevan dan sejalan dengan kebutuhan yang diharapkan dalam tenaga kerja					
2.	Pengarahan yang diberikan lembaga relevan dan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan dalam tenaga kerja					

Sumber: Bodnar dan Hopwood (2014:13)

KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA						
No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	RR	TS	STS
No. 1 Tentang Pengetahuan						
1.	Saya mengetahui tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, dan siklus akuntansi dengan baik					
2.	Saya memahami tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, dan siklus akuntansi dengan baik					
PSAP No. 2 Tentang <i>Skill</i> atau Kemampuan						
1.	Saya dapat menyusun tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, dan siklus akuntansi dengan baik					
2.	Saya dapat menyajikan tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, dan siklus akuntansi dengan baik					
PSAP No. 3 Tentang Prilaku						
1.	Saya melakukan aktivitas kontrol terhadap SDM setelah adanya pelatihan dalam menyusun dan menyajikan pelaporan keuangan					
2.	Saya melakukan pengarahan terhadap SDM setelah adanya pelatihan dalam menyusun dan menyajikan pelaporan keuangan					

Sumber: Mangkunegara (2016:40)

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH						
No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	RR	TS	STS
Tingkat Relevansi						
1.	Laporan keuangan yang disusun selesai secara tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan saat ini dan mengoreksi keputusan masa lalu (<i>feedback value</i>).					
2.	Laporan keuangan yang saya susun selesai secara tepat waktu dan mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.					
3.	Laporan keuangan yang tersusun sesuai dengan SAP, dengan informasi yang lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan					
Tingkat Keandalan						
1.	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.					
2.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah benar dan memenuhi kebutuhan para pengguna dan dapat di verifikasi kebenarannya					
3.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah benar dan memenuhi kebutuhan para pengguna dan tidak berpihak/netral pada kepentingan pihak tertentu sehingga teruji kebenarannya.					
Tingkat Keterbandingan						
1.	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang disusun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
Tingkat Keterpahaman						
1.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.					

2.	Laporan keuangan disajikan dan disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan dipahami					
----	---	--	--	--	--	--



AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA						
No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	RR	TS	STS
Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum						
1.	Adanya keterkaitan struktur organisasi dalam penggunaan jabatan dalam membuat permohonan dan penggunaan dana yang diberikan					
2.	Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam permohonan dan penggunaan sumber dana yang diberikan					
Akuntabilitas Proses						
1.	Prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi					
2.	Pengawasan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya <i>mark up</i> dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan dan dianggarkan					
3.	Pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya <i>mark up</i> dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan dan dianggarkan					
Akuntabilitas Program						
1.	Adanya visi dan misi program tujuan yang ditetapkan, dapat dicapai atau tidak sesuai dengan rencana organisasi					
2.	Adanya kejelasan suatu program harus dapat memberikan manfaat dan dampak yang diberikan					
Akuntabilitas Kebijakan						
1.	Adanya suatu kebijakan setiap laporan setiap ada program yang telah dilaksanakan					
2.	Melakukan evaluasi dan pertanggung jawab setiap pengajuan, berjalannya dan selesainya program					

Sumber: Mardiasmo (2002:21)

DATA HASIL PENGISIAN KUESIONER
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	X1.13	X1.14	X1.15	X1.16	X1.17	X1.18	X1.19	X1.20	X1.21	X1.22	X1.23	X1.24	X1.25	X1.26	X1.27	X1.28
5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	2	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	2	2	2	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	2	2	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	2
5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
5	5	5	2	2	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4
5	4	3	5	2	3	4	1	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3
5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	2	2	2	4	2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	4	3	4	4	3	4	5	5	4	5	4	4	3	4	5	5	5	5	5	2	4	5	4	5
5	5	5	3	5	2	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
5	4	4	4	3	4	4	3	5	5	4	4	2	3	4	4	4	4	5	5	5	2	4	4	5	4	3	4
5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4
4	5	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	5	5	4	3	4	4	5	5	3	3	4	3	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	3	4	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
4	4	2	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	5	4	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	4	3	4	4	3	4	5	5	4	5	4	4	3	4	5	5	5	5	2	4	5	4	5	5
5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5



DATA HASIL PENGISIAN KUESIONER
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10
4	5	4	4	5	4	4	4	4	5
3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	4	3	4	4	3	3	3	4
3	3	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	4	4	4	3	4	3	3	3
4	4	4	4	5	4	5	4	5	4
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	4	5	4	4	4	4	4	3
4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	5	3	4	4	4	3	4	4
5	5	3	3	3	3	3	4	3	3
4	4	5	4	3	5	5	5	5	3
5	3	4	3	4	3	4	4	3	4
3	3	4	3	4	3	4	4	4	4
4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
3	4	3	3	3	3	4	3	3	3
5	3	4	4	5	5	5	5	5	5
4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
3	3	4	4	4	2	3	2	3	3
3	4	4	4	5	5	4	4	5	5
5	5	3	3	3	3	3	3	5	4
4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
5	5	3	3	3	3	4	4	4	3
3	4	4	4	4	4	3	5	4	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	4	4	4	3	5	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	4	3	5	5	5	5	3
4	5	4	4	5	4	4	4	4	5

DATA HASIL PENGISIAN KUESIONER
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

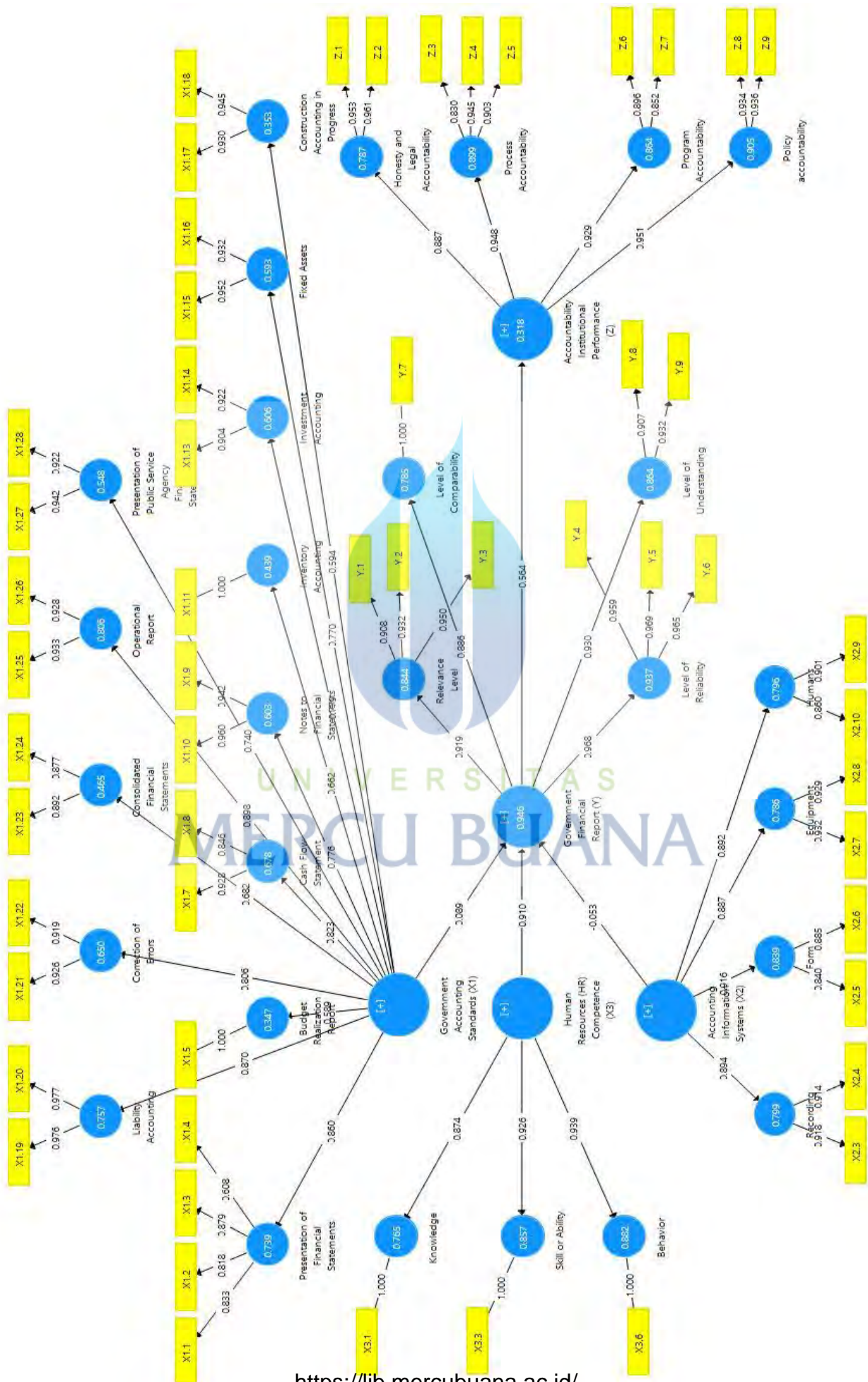
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6
5	5	5	4	4	5
5	3	5	3	3	5
5	4	5	4	4	5
5	3	5	4	3	5
4	3	4	3	3	4
4	5	4	4	5	5
5	3	5	3	3	5
5	3	5	3	3	5
4	3	4	3	4	4
4	4	4	4	4	4
4	5	4	5	5	4
4	4	4	4	3	4
4	5	5	4	4	5
5	4	5	4	4	5
5	3	5	3	5	5
4	3	5	2	4	4
4	3	4	5	5	4
4	4	4	3	3	4
4	4	5	4	4	5
4	3	4	4	3	4
4	3	5	3	5	4
4	5	5	5	4	5
5	4	5	4	4	5
4	3	4	3	3	4
5	3	5	3	3	5
5	4	4	5	5	4
5	4	5	5	4	5
3	4	4	5	5	4
4	3	4	3	3	4
4	4	4	4	3	4
4	3	4	3	3	4
5	4	5	4	4	5
5	4	5	4	4	5
4	4	4	4	3	4
5	4	5	4	4	5
4	3	4	5	5	4
5	5	5	4	4	5

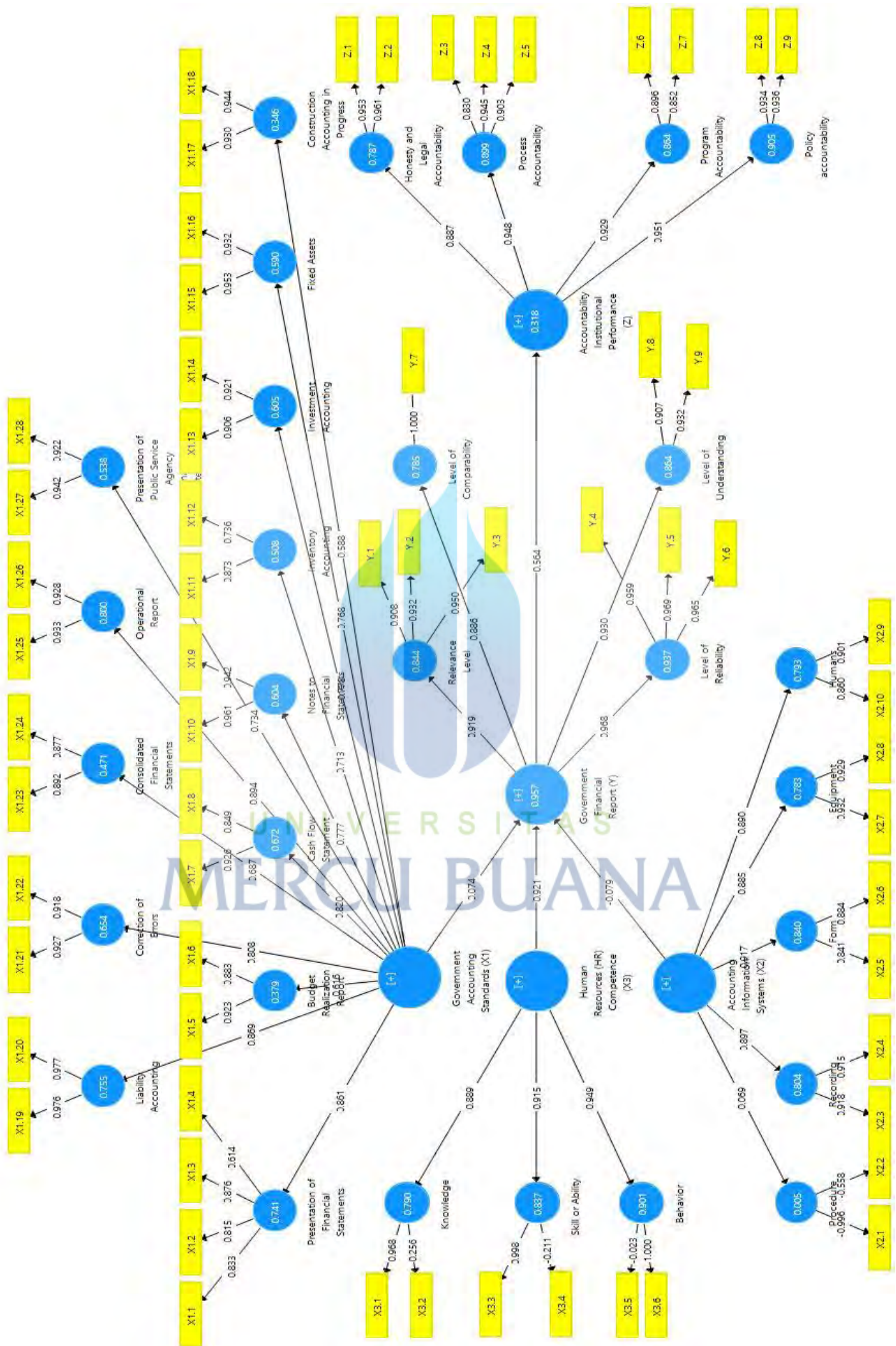
DATA HASIL PENGISIAN KUESIONER
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

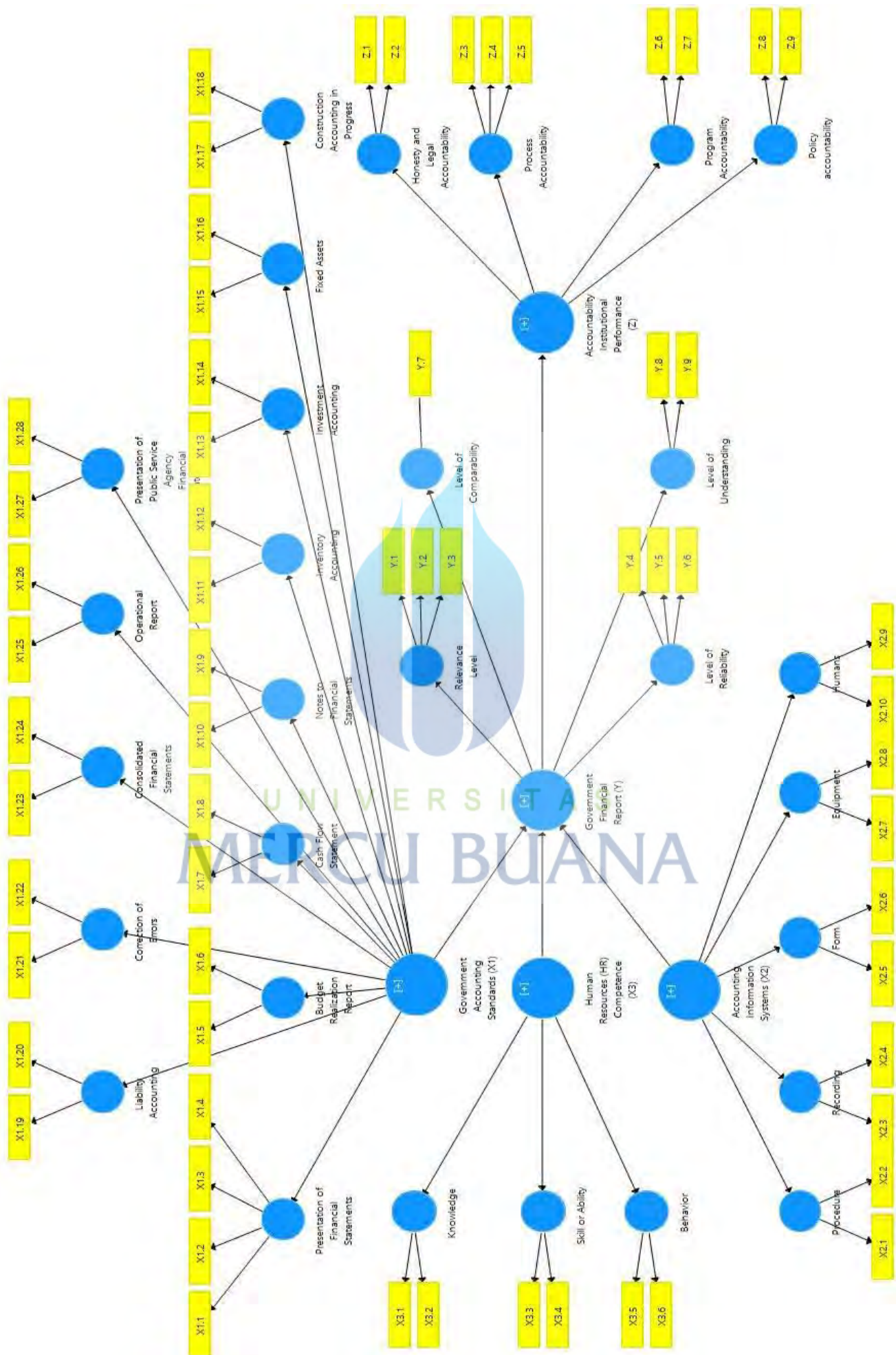
Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	4	4	5
5	5	5	5	5	5	4	4	5
4	5	4	4	5	4	5	4	4
4	3	3	3	4	4	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	5	5	5	5
4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	5	5	5	4	5	4
4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	3	4	4	4	3	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	3	3	3	4	4	3	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5

DATA HASIL PENGISIAN KUESIONER
AKUNTABILITAS PUBLIK

Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z.7	Z.8	Z.9
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	4	4	4	4
4	4	4	5	4	5	4	5	4
4	4	4	4	5	5	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	3	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	5	5	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	4	5	4	5	5	4
4	4	3	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	5	5	5	5	5	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	4	5	5	5	5	4	4
4	5	5	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	3
3	4	4	4	4	4	4	4	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	4	2	2	2	5	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	4	3	3	4	4	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	3	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5







PERNYATAAN *SIMILARITY CHECK*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa karya ilmiah yang ditulis oleh:

Nama : Lauhul Machfuzh
NIM : 55517120010
Program Studi : Magister Akuntansi

dengan judul "*THE IMPACT OF THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS ON INSTITUTION PERFORMANCE ACCOUNTABILITY*", telah dilakukan pengecekan *similarity* dengan sistem Turnitin pada tanggal 20 Januari 2022, didapatkan nilai persentase sebesar 22%.

Jakarta, 20 Januari 2020

Administrator Turnitin

UNIVERSITAS
MERCU BUANA


Arle Pangudi, A.Md